

Forging

AHEAD

In Dynamic Asia

PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN 2013
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
REPORT 2013

DBS. Living, Breathing Asia



Forging **AHEAD**

In Dynamic Asia

DBS Indonesia telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Kehadiran DBS Indonesia di negara ini telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Saat ini, dengan 1 kantor pusat, 34 kantor cabang dan 4 kantor loan centers di seluruh Indonesia, DBS Indonesia berkomitmen untuk mendukung transformasi Indonesia. Kami membantu setiap individu untuk menjadi sejahtera, mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnis.

Kami akan terus merintis jalan baru dengan merangkul ruang baru digital dan membentuk masa depan perbankan. Kami percaya kemampuan kami untuk bergerak cepat dalam menangkap peluang, telah memungkinkan kami untuk terus maju dalam Asia yang dinamis bersama dengan Indonesia.

DBS Indonesia has been operating in Indonesia for over 20 years. Our presence in the nation had demonstrated our commitment to support economic growth of Indonesia.

Today, with 1 head office, 34 branches and 4 loan centers across Indonesia, DBS Indonesia is committed in helping Indonesia transform. We help individuals prosper, enable business growth and expansion.

We will continue to break new ground as we embrace the digital frontier and shape the future of banking. We are confident our ability to move swiftly to seize opportunities, have enabled us to forge ahead in a dynamic Asia along with Indonesia.



Daftar Isi

Table of Contents

04 Laporan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Report

05	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Implementation	34	Kecurangan Internal Internal Fraud
05	Praktik-Praktik Tata Kelola Perusahaan di PT Bank DBS Indonesia Good Corporate Governance Practices at PT Bank DBS Indonesia	34	Kasus Hukum Legal Cases
06	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting Of Shareholders	35	Transaksi yang Menyebabkan Benturan Kepentingan Transactions Causing Conflict of Interest
07	Dewan Komisaris The Board Of Commissioners	36	Pembelian Kembali Saham dan Pembelian Kembali Obligasi Share Buyback / Bond Buyback
09	Direksi The Board Of Directors	36	Dana untuk Aktivitas Sosial dan Politik Termasuk Nama-Nama Penerima Dana Fund for Social and Political Activities Including Names of Beneficiaries
11	Laporan Komite di Bawah Komisaris Report of Committees under The Board of Commissioners	37	Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal Compliance, Internal Audit and External Audit Functions
20	Laporan Komite di Bawah Direksi Report of Committees under The Board Of Directors	43	Fungsi Manajemen Risiko Risk Management Function
31	Kebijakan/Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Policies/Package of Remuneration and Other Facilities Received by The Board of Directors and The Board of Commissioners	45	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Dalam Jumlah Besar Provision of Funds to Related Parties and In Large Exposures
33	Kepemilikan Saham dan Opsi Saham Shareholding and Share Option	45	Rencana Strategis Strategic Plan
34	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Ratios of The Highest to Lowest Salaries	47	Transparansi Kondisi Finansial dan Non-Finansial Transparency of Financial and Non-Financial Conditions
		47	Hasil Pelaksanaan Self Assessment GCG Self Assessment Result of GCG Implementation



47	Etika Perusahaan Company Code of Ethics
49	Komitmen Perusahaan Terhadap Perlindungan Konsumen Company Commitment to Customer Protection
51	Whistle Blowing Whistle Blowing
52	Akses Informasi & Data Perusahaan Access of Corporate Information & Data
53	Laporan Penilaian Sendiri Self Assessment Report





Laporan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate
Governance Report

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Implementation



Implementasi tata kelola perusahaan di DBS Indonesia bertujuan untuk menjaga kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan dan tujuan usaha bank.

The implementation of Good Corporate Governance in DBS Indonesia aimed to maintain the interest of shareholders, stakeholders and the Bank's business goals.

Praktik-Praktik Tata Kelola Perusahaan Di PT Bank DBS Indonesia

Implementasi Tata Kelola Perusahaan (GCG) di PT Bank DBS Indonesia ("DBS Indonesia" atau "Bank") mengadopsi ketentuan Bank Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan GCG, serta undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait. Selain itu, DBS Indonesia juga merujuk kepada penerapan Tata Kelola yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas DBS Indonesia yaitu DBS Bank Ltd.

Good Corporate Governance Practices At PT Bank DBS Indonesia

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in PT Bank DBS Indonesia ("DBS Indonesia" or "Bank") adopts regulations of Bank Indonesia related to GCG, and other related laws and regulations. In addition, DBS Indonesia also makes reference to practices of Corporate Governance implemented by the majority Shareholder of DBS Indonesia, that is, DBS Bank Ltd.

Selama tahun 2013, pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di DBS Indonesia dapat kami laporkan sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham

A. Hak dan Wewenang

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan hierarki tertinggi di dalam organisasi DBS Indonesia. Adapun wewenang RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Bank, mengesahkan Laporan Keuangan, menyetujui Perubahan Anggaran Dasar dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan menetapkan jumlah honorariumnya.

B. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Selama tahun 2013, DBS Indonesia telah mengadakan 3 (tiga) kali RUPS yaitu pada tanggal 30 Mei, 15 Agustus, dan 30 Agustus, berkaitan dengan perubahan komposisi Direksi, perubahan klausula dalam Anggaran Dasar, persetujuan atas Laporan Tahunan DBS Indonesia untuk tahun buku 2012 beserta Laporan Tata Kelola Perusahaan Bank, pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2012 dan penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member of PwC Global Network sebagai pemeriksa keuangan independen untuk tahun buku 2013.

During 2013, implementation of GCG principles in DBS Indonesia can be reported as follows:

I. General Meeting Of Shareholders

A. Rights and Authority

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in the DBS Indonesia organizational structure. The GMS has the authority such as to make decisions related to appointment or dismissal of the Board of Commissioners or the Board of Directors, evaluation of the Board of Commissioners' and Directors' performance as noted in the Bank's Annual Report, ratification of the Audited Financial Statement, approval of changes in the Company's Articles of Association, appointment of a Public Accounting Firm and determination of remuneration packages.

B. Implementation of General Meeting of Shareholders

In 2013, DBS Indonesia has conducted 3 (three) GMS: on 30 May, 15 August and 30 August, related to changes in the Board of Directors composition, amendment of clauses in the Articles of Association, approval of Annual Report of DBS Indonesia, including the Good Corporate Governance Implementation Report of the Bank for the financial year 2012, to give full discharge and release to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in respect to the management and supervision conducted by them during the Financial Year 2012, and to re-appoint the accounting firm, and to re-appoint the accounting firm of Tanudiredja, Wibisana & Partner - a member of PwC Global Network, as independent auditor for financial year 2013.

II. Dewan Komisaris

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan terselenggaranya GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi Bank;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, Bank Indonesia dan otoritas lain; dan,
5. Memberitahukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

B. Keanggotaan, Komposisi dan Independensi

Dewan Komisaris DBS Indonesia terdiri dari 4 (empat) orang, dan 2 (dua) di antaranya (50%) adalah komisaris independen, yaitu pihak yang tidak memiliki afiliasi apapun (hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga) dengan para Direktur, para Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Berikut adalah komposisi Dewan Komisaris DBS Indonesia per tanggal 31 Desember 2013.

II. The Board Of Commissioners

A. Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners has duties and responsibilities as follows:

1. To ensure the implementation of GCG in all organizational levels of the Bank;
2. To provide oversight towards the implementation of duties and advice to the Board of Directors;
3. To guide, supervise and evaluate the implementation of the Bank's strategy and objectives;
4. To ensure that the Board of Directors has followed up on findings and recommendation from Internal Audit, external auditor, Bank Indonesia and other authority; and,
5. To inform Bank Indonesia no later than 7 (seven) days upon any finding that there has been a violation of banking and finance laws and regulations finance laws and regulations and such condition may endanger the continuity of the Bank.

B. Membership, Composition and Independency

The Board of Commissioners of DBS Indonesia consists of 4 (four) persons, of whom 2 (two) (50%) are independent commissioners who are not affiliated in any way (commercial, management, share ownership and/or family relationship) with the Directors, Commissioners or controlling shareholders, which might affect their independency. The following is the composition of the Board of Commissioners of DBS Indonesia as of 31 December 2013.

Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Tanggal Persetujuan Approval dates		Masa Jabatan Term of Service**
			RUPS GMS	Bank Indonesia	
Tan Kok Kiang Bernard Richard *)	Presiden Komisaris/ President Commissioner	Jakarta, Indonesia	28 April 2011/ 28 April 2011	27 Oktober 2010/ 27 October 2010	28 April 2014/ 28 April 2014
Lim Chu Chong	Komisaris/ Commissioner	Singapura Singapore	28 April 2011/ 28 April 2011	04 Februari 2011/ 04 February 2011	28 April 2014/ 28 April 2014
Prof. Dr. Subroto	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Jakarta, Indonesia	28 April 2011/ 28 April 2011	09 Agustus 2003/ 09 August 2003	28 April 2014/ 28 April 2014
Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Jakarta, Indonesia	28 April 2011/ 28 April 2011	13 Februari 2006/ 13 February 2006	28 April 2014/ 28 April 2014

*) Mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris efektif sejak 26 Februari 2014
Resigned as President Commissioner with effective date as of 26 February 2014

***) Bergantung pada tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan Bank tahun 2014
Subject to commencement date of Annual GMS of The Bank year 2014

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris dalam tahun 2013 telah melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan yang antara lain mencakup:

1. Rencana dan realisasi Rencana Bisnis Bank;
2. Tingkat kesehatan dan profil risiko Bank;
3. Kinerja Bank, termasuk kecukupan permodalan, kualitas aktiva dan likuiditas Bank;
4. Pertumbuhan kredit, terutama kredit untuk jenis usaha kecil dan menengah;
5. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan kerja;
6. Implementasi kebijakan dan kerangka berkaitan dengan kredit dan manajemen risiko;
7. Realisasi rencana audit tahunan oleh Satuan Kerja Audit Internal;
8. Penerapan GCG dan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya;
9. Pengembangan sistem informasi dan teknologi; dan,

C. Implementation of Duties and Responsibilities

In 2013, the Board of Commissioners has performed its supervisory function over management policy which covers the following:

1. Planning and realisation of Bank Business Plan;
2. Bank soundness rating and Bank risk profile;
3. Bank performance, including capital adequacy, asset quality and liquidity;
4. Credit growth, especially credit for small and medium enterprises;
5. Development and improvement of human resource quality and working environment;
6. Implementation of policies and framework related to credit and risk management;
7. Realisation of annual audit plan by internal audit working unit;
8. Implementation of GCG and risk management and compliance with Bank Indonesia regulations and other prevailing laws and regulations;
9. Development of information and technology system; and,

10. Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah, program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

10. Implementation of Know Your Customer principle, Anti Money Laundering program and prevention of financing of terrorism.

D. Rapat Dewan Komisaris

Dalam tahun 2013, Dewan Komisaris mengadakan 4 (empat) rapat formal yang dihadiri baik secara langsung maupun melalui saluran konferensi jarak jauh dengan keikutsertaan masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

D. Board of Commissioners' Meetings

In 2013, the Board of Commissioners held 4 (four) formal meetings, which were attended either in person or via teleconference with the following details of participation:

Name Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	
		Fisik Physical Attendance	Telekonferensi Teleconference
Tan Kok Kiang Bernard Richard*	4	4	0
Lim Chu Chong		2	2
Prof. Dr. Subroto		4	0
Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat		4	0

*) Mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris efektif sejak 26 Februari 2014
Resigned as President Commissioner with effective date as of 26 February 2014

III. Direksi

III. The Board Of Directors

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

A. Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of the Board of Directors are as follow:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, auditor eksternal, Bank Indonesia dan otoritas lain.

1. Fully responsible for the management of the Bank.
2. Manage the Bank in accordance to their authority and responsibility as regulated in Article of Association and prevailing laws and regulations.
3. Ensure implementation of Good Corporate Governance across organizational level and hierarchy in the Bank.
4. To follow up findings and recommendation from Internal Audit Working Unit, external auditor and Bank Indonesia and other supervisory body.

5. Direksi menyediakan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Komisaris.

B. Keanggotaan, Komposisi dan Independensi

Per tanggal 31 Desember 2013, Direksi DBS Indonesia terdiri dari 6 (enam) orang yang terdiri dari Presiden Direktur dan 5 (lima) Direktur lainnya.

Para anggota Direksi, independen dari pemegang saham mayoritas, DBS Bank Ltd., dan tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, tidak merangkap jabatan maupun memiliki lebih dari 25% saham modal disetor pada perusahaan lain. Komposisi Direksi DBS Indonesia per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

5. The Board of Directors provide information which are complete, accurate, updated and timely, to the Board of Commissioner.

B. Membership, Composition and Independency

As of 31 December 2013, the Board of Director of DBS Indonesia consists of 6 (six) persons composed of President Director and 5 (five) Directors.

Member of the Board of Directors are independent from the majority shareholder, DBS Bank Ltd., and does not have family relationship up to second degree with other member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners, does not hold any concurrence position and none of the Directors has more than 25% of paid-up capital in other company. Composition of the Board of Directors of DBS Indonesia as per reporting date is as follow:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal persetujuan Approval dates		Masa Jabatan Term of Services**
		RUPS GMS	Bank Indonesia	
Teo Tzai Win Melvin	Presiden Direktur President Director	12 Oktober 2012/ 12 October 2012	15 Agustus 2012/ 15 August 2012	28 April 2014/ 28 April 2014
Satia Indrarini	Direktur Director	15 Agustus 2008/ 15 August 2008	13 Februari 2006/ 13 February 2006	28 April 2014/ 28 April 2014
Adrianus Dani Prabawa *	Direktur Director	15 Agustus 2008/ 15 August 2008	24 Januari 2006/ 24 January 2006	28 April 2014/ 28 April 2014
Mahdan Ibrahim	Direktur Director	17 Februari 2010/ 17 February 2010	27 Mei 2010/ 27 May 2010	28 April 2014/ 28 April 2014
Jeny Gono	Direktur Director	17 Februari 2010/ 17 February 2010	13 November 2009/ 13 November 2009	28 April 2014/ 28 April 2014
Steffano Ridwan	Direktur Director	30 Agustus 2013/ 30 August 2013	10 Juli 2013/ 10 July 2013	28 April 2014/ 28 April 2014

* Mengundurkan diri sebagai Direktur efektif sejak 7 Januari 2014
Resigned as Director with effective date as of 7 January 2014

** Bergantung pada tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan Bank tahun 2014
Subject to commencement date of Annual GMS of The Bank year 2014

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam tahun 2013, Direksi telah melaksanakan fungsi pengurusan yang antara lain mencakup:

C. Implementation of Tasks and Responsibilities

In 2013, the Board of Directors has carried out management function which cover the following:

1. Memastikan Bank memiliki manajemen yang kompeten dan struktur organisasi yang baik sebagai bagian dari akuntabilitas Bank.
2. Memastikan bahwa Bank telah melaksanakan rencana bisnis Bank dan meninjau ulang rencana bisnis.
3. Memastikan bahwa Bank telah beroperasi secara hati-hati dan dalam kerangka undang-undang dan ketentuan-ketentuan.
4. Memastikan Bank telah dijalankan dengan integritas yang tinggi dan transparan.
5. Memastikan dilaksanakannya prinsip GCG dalam setiap bisnis Bank pada semua tingkat organisasi
6. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengurusan Bank melalui kebijakan kepengurusan.

1. To ensure that the Bank has competent management and adequate organizational structure as part of the Bank's accountability.
2. To ensure that the Bank has implemented the Bank Business Plan and reviewed the Plan.
3. To ensure that the Bank has operated prudently and within the framework of laws and regulations.
4. To ensure that the Bank has been managed with high integrity and transparency.
5. To ensure the implementation of GCG Principles in all organisational levels of the Bank.
6. The Board of Directors is fully responsible for the management of the Bank, made through management policy.

D. Rapat Direksi

Dalam tahun 2013, Direksi telah mengadakan 11 (sebelas) rapat formal sebagai berikut:

D. Board of Directors' Meetings

In 2013, there were 11 (eleven) Board of Directors meetings, as follows:

Nama Name	Rapat Direksi <i>The Board of Directors' meeting</i>	
	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance
Teo Tzai Win Melvin	11	11
Adrianus Dani Prabawa**	11	11
Mahdan Ibrahim	11	9
Birman Prabowo*	11	2
Satia Indrarini	11	10
Jeny Gono	11	11
Steffano Ridwan	11	4

* Birman Prabowo mengundurkan diri sebagai Direksi per tanggal 17 Mei 2013.

Birman Prabowo has tendered his resignation as Director with his last effective day on 17 May 2013.

** Mengundurkan diri sebagai Direktur efektif sejak 7 Januari 2014

Resigned as Director with effective date as of 7 January 2014

IV. Laporan Komite di Bawah Komisaris

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Tata Kelola Perusahaan, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite dibawah ini:

- A. Komite Audit;
- B. Komite Pemantauan Risiko;
- C. Komite Remunerasi dan Nominasi.

IV. Report of Committees under The Board of Commissioners

In order to ensure the effectiveness of the tasks and responsibilities based on GCG Regulation, the Board of Commissioners has established the following committees:

- A. Audit Committee;
- B. Risk Monitoring Committee;
- C. Remuneration and Nomination Committee.

A. Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

1. Struktur, Independensi dan Riwayat Hidup Anggota Komite

Struktur keanggotaan Komite Audit pada akhir periode laporan adalah sebagai berikut:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>
Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat	Independent Commissioners Chairman and Member of Committee
Nina Tan	Independent Party - Member of Committee
Bagus Suksmo Djati Nur Buwono	Independent Party - Member of Committee

Riwayat Hidup Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

a. Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat

Soemadi menamatkan pendidikan Sarjana dalam bidang Diplomasia dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1965) dan kemudian meraih Diploma dalam bidang Diplomasia dari Institute Internationale d'Administration Publique, Paris (1969). Beliau bergabung dengan DBS Indonesia di bulan Februari 2006.

Beliau memiliki karir yang panjang dan cemerlang di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Beliau mulai mengabdikan di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia sejak tahun 1965. Beliau adalah Duta Besar untuk Jepang dan Mikronesia tahun 1998-2002 dan Duta Besar untuk Amerika Serikat tahun 2002-2005. Sebelumnya, beliau memperoleh beberapa penunjukan yang masih terkait dengan Departemen Luar Negeri. Beliau adalah diplomat pertama yang memimpin

A. Audit Committee

The Audit Committee is responsible for monitoring and evaluating the audit plan and implementation and monitoring follow-up actions from the audit findings, in order to assess the adequacy of internal audit, including the adequacy of the financial reporting process.

1. Structure, Independency and Curriculum Vitae of Committee Members

The structure and membership of Audit Committee as of end of this reporting period is as follows:

Curriculum vitae of Members of the Audit Committee are as follows:

a. Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat

Soemadi graduated with a Bachelor's Degree in Diplomacy from Gajah Mada University, Yogyakarta (1965) and a Graduate Diploma in Diplomacy from Institute Internationale d'Administration Publique, Paris (1969). He joined DBS Indonesia in February 2006.

He had a very long and distinguished career in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, from 1965. He was Ambassador to Japan and the Federated States of Micronesia from 1998 to 2002 and Ambassador to the United States from 2002 to 2005. Prior to that, he received several appointments still related to the Ministry of Foreign Affairs. He was also the first diplomat to lead the Indonesian Embassy in Washington for over 30 years. He received several honors

KBRI di Washington lebih dari 30 tahun. Beliau juga menerima beberapa bintang jasa baik dari pemerintah Republik Indonesia maupun negara-negara lainnya.

b. Nina Tan

Nina Tan bergabung dengan DBS Indonesia sebagai anggota independen Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko sejak tahun 2007. Beliau adalah Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1990) yang lulus dengan predikat *Cum-Laude*.

Sebelum bergabung dengan DBS Indonesia, beliau juga adalah Partner pada PT Solid Consulting Indonesia dan telah memiliki pengalaman selama 14 tahun di bidang perbankan, antara lain pernah menjabat sebagai *EVP-General Manager, Business Financial Services (SME), SVP-General Manager Wealth Management, VP-Head of Retail Banking* dan *VP-Business Finance* di Standard Chartered Bank Indonesia. Sebelumnya, beliau adalah *Manager Planning/Financial Analysis and Travel Accounting* di American Express Indonesia dan pernah bekerja di Procter & Gamble Indonesia.

c. Bagus Suksmo Djati Nur Buwono

Bagus Suksmo Djati Nur Buwono bergabung dengan DBS Indonesia pada bulan Desember 2011 sebagai anggota independen Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko. Beliau meraih Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada (1996) dan Master Hukum (LLM) bidang Hukum Bisnis Internasional dari the *University of Manchester, UK* (2005) dengan beasiswa program *British Chevening Award*.

Beliau adalah principal partner pada Bagus *Enrico & Partners, Counsellors at Law*, sebuah firma hukum yang telah

from the government of the Republic of Indonesia as well as from other countries.

b. Nina Tan

Nina Tan joined DBS Indonesia as an independent member of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee in 2007. She holds a Bachelor's Degree in Accounting from Gajah Mada University, Yogyakarta (1990), and graduated *Cum-Laude*.

Prior to joining DBS Indonesia, she worked as a Partner of PT Solid Consulting Indonesia and has experience in banking for 14 years, holding such posts as *EVP-General Manager, Business Financial Services (SME), SVP-General Manager Wealth Management, VP-Head of Retail Banking* and *VP-Business Finance* in Standard Chartered Bank, Indonesia. Previously, she was *Manager and Planning/Financial Analysis and Travel Accounting* in American Express Indonesia and has also worked for Procter & Gamble in Indonesia.

c. Bagus Suksmo Djati Nur Buwono

Bagus Suksmo Djati Nur Buwono joined DBS Indonesia in December 2011 as an independent member of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee. He holds a Bachelor's in Law from Gajah Mada University (1996) and a Master's of Law (LLM) in International Business Law from The University of Manchester, UK (2005) with a British Chevening Award Scholarship.

He is a principal partner of Bagus *Enrico & Partners, Counsellors at Law*, a well regarded law firm acknowledged by

diakui oleh Legal500, *International Financial Law Review* dan *AsiaLaw*; dan menangani klien baik lokal maupun Internasional dalam bidang korporasi dan komersial, merger & akuisisi, pasar modal, perbankan, asuransi dan keuangan, energi dan sumber daya alam, teknologi, media dan telekomunikasi, proyek dan infrastruktur, serta real estate dan properti.

Disamping pengalamannya sebagai advokat, beliau pernah menjabat sebagai Country Head of Legal and Company Secretary PT Bank Barclays Indonesia dan SVP Head of Legal PT Bank Mizuho Indonesia.

Beliau memperoleh Sertifikasi Internasional dalam Risiko Perbankan dan Regulasi yang dikeluarkan oleh *Global Association of Risk Professional*.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b) Meninjau ulang terhadap:
 - (1) pelaksanaan tugas SKAI;
 - (2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - (4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan SKAI, Akuntan Publik, Bank Indonesia dan otoritas lainnya.

Legal500, the *International Financial Law Review* and *AsiaLaw*, and serves local and international clients in corporate and commercial, mergers & acquisitions, capital markets, banking, insurance and finance, energy and natural resources, technology, media and telecommunications, project and infrastructure, and real estate and property.

Apart from his experience as a lawyer, he was a Country Head of Legal and Company Secretary at PT Bank Barclays Indonesia and SVP Head of Legal at PT Bank Mizuho Indonesia.

He holds an International Certificate in Banking Risk and Regulation, issued by the *Global Association of Risk Professionals*.

2. Implementation of Tasks and Responsibilities

- a) Conduct oversight and evaluate plans and realisation of audit and to monitor follow-up of audit findings for the purpose of adequacy of internal control, including adequacy in the financial reporting process.
- b) Review the following:
 - (1) the performance of Internal Audit;
 - (2) adequacy of audit conducted by the Public Accounting Firm, pursuant to prevailing audit standards;
 - (3) Adequacy of financial reports to prevailing accounting standards, and
 - (4) Follow-up implementation by the Board of Directors upon findings from Internal Audit, External auditor, Bank Indonesia, and other authorities.

- c) Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

3. Rapat Komite Audit

Selama tahun 2013, Komite Audit telah mengadakan 4 rapat formal. Rapat Komite Audit yang dihadiri oleh Bapak Soemadi Brotodiningrat (4 kali), Ibu Nina Tan (3 kali) and Bapak Bagus Suksmo Djati (4 kali). Dalam rapat formal tersebut, eksternal auditor turut hadir untuk memberikan informasi mengenai audit yang dilaksanakan pada Bank maupun informasi-informasi lainnya yang relevan bagi Komite Audit.

B. Komite Pemantauan Risiko

Komite Pemantauan Risiko bertanggung jawab dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan risiko, strategis dan kinerja Unit Manajemen Risiko Bank.

1. Struktur, Independensi dan Riwayat Hidup Anggota Komite

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko ("RMC") pada akhir periode pelaporan adalah sama dengan struktur dan keanggotaan Komite Audit.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
- b) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

- c) Provide recommendations on the appointment of a Public Accounting Firm to GMS, through the Board of Commissioners, in accordance with prevailing regulations.

3. Audit Committee Meetings

In 2013, the Audit Committee has conducted 4 formal Audit Committee meetings. The Audit Committee meetings were attended by Mr. Soemadi Brotodiningrat (4 times), Mrs. Nina Tan (3 times) and Mr. Bagus Suksmo Djati (4 times). In the formal meeting, the external auditor was also invited to provide updates pertaining to audits conducted in the Bank, as well as providing any other relevant information for the Audit Committee.

B. Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is responsible for monitoring and evaluation of the risk policies, strategies and performance of the Bank's Risk Management Unit.

1. Structure, Independency and Curriculum Vitae of Committee Members

The structure and membership of the Risk Monitoring Committee as of the end of the reporting period is similar to the structure and membership of the Audit Committee.

2. Implementation of Tasks and Responsibilities

- a) Evaluate policy and implementation of risk management, and
- b) Monitor and evaluate the implementation of tasks and responsibilities of the Risk Management Committee and Risk Management Working Unit.

3. Rapat Komite Pemantauan Risiko

Selama tahun 2013, Komite Pemantauan Risiko telah mengadakan 4 (empat) kali rapat formal.

Rapat Komite Pemantauan Risiko dihadiri oleh Bapak Soemadi Brotodiningrat (4 kali), Ibu Nina Tan (3 kali) dan Bapak Bagus Suksmo Djati (4 kali).

3. Risk Monitoring Committee: Meetings

In 2013, the Risk Monitoring Committee has conducted 4 (four) formal meetings.

The meetings of Risk Monitoring Committee were attended by Mr. Soemadi Brotodiningrat (4 times), Ms. Nina Tan (3 times) and Mr. Bagus Suksmo Djati (4 times).

C. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan kompensasi dan remunerasi Bank. Komite ini juga memiliki tanggung jawab berkaitan dengan rekomendasi untuk pencalonan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dan pencalonan anggota independen dari komite di bawah Dewan Komisaris.

1. Struktur, Independensi dan Riwayat Hidup Anggota Komite

Struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi ("RNC") pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>
Prof. Dr. Subroto	Independent Commissioners Chairman and Member of Committee
Michael Kristianto Sutisna	Independent Party - Member of Committee
Tan Kok Kiang Bernard Richard *	President Commissioner Independent Party - Member of Committee

*) Mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris efektif sejak 26 Februari 2014
Resigned as President Commissioner with effective date as of 26 February 2014

Riwayat hidup Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

C. Remuneration And Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee is responsible for evaluating the compensation and remuneration policy of the Bank. This Committee, in addition, is also responsible for matters related to recommendations for the appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and for the appointment of an independent member of the Committee established under the Board of Commissioners.

1. Structure, Independency and Curriculum Vitae of Committee Members

The structure and membership of the Remuneration and Nomination Committee ("RNC") as of the end of the reporting period was as follows:

Curriculum vitae of Members of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

a. Prof. Dr. Subroto

Prof. Dr. Subroto meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1952), meraih gelar Master of Arts dari McGill University (1956) dan Doktor dalam bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia (1958).

Beliau adalah Menteri Korporasi pada tahun 1973-1978, Menteri Pertambangan dan Energi tahun 1978-1988 dan Sekretaris Jenderal OPEC 1988-1994. Beliau juga merupakan Guru Besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Universitas Pancasila. Beliau bergabung dengan DBS Indonesia pada bulan Juni 2003.

Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Indonesia Institute of Energy Economics (IIE), Ketua Masyarakat Pertambangan dan Energi Bimasena dan Ketua Yayasan Bina Anak Indonesia.

Beliau memperoleh beberapa penghargaan dan tanda jasa diantaranya, “Das Grosse Verdienstkreuz Mit Stern Und Schulterband” dari Presiden Jerman terdahulu, Karl Carstens, “Satyalencana Penegak”, “Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI” dan “Bintang Mahaputra Adiprana II” dari Pemerintah Republik Indonesia.

b. Michael Kristianto Sutisna

Michael Kristianto Sutisna bergabung dengan DBS Indonesia sebagai Head of Rewards and Project Management Unit Head pada tahun 2012. Beliau merupakan Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia (1998).

a. Prof. Dr. Subroto

Prof. Dr. Subroto graduated with a Bachelor's Degree in Economics from University of Indonesia (1952), holds a Master's Degree from McGill University (1956) and a Doctorate in Economics from the University of Indonesia (1958).

He was Minister of Cooperatives from 1973-1978, Minister of Mines and Energy 1978-1988, and Secretary General of OPEC 1988-1994. He is a Professor of the Faculty of Economics, University of Indonesia and Pancasila University. He joined DBS Indonesia in June 2003.

Currently, he is Chairman of the Indonesia Institute of Energy Economics (IIE), Chairman of Bimasena Mines and Energy Society and also Chairman of Yayasan Bina Anak Indonesia.

He received “Das Grosse Verdienstkreuz Mit Stern Und Schulterband”, honor from the former President of Germany, Karl Carstens, and the “Satyalencana Penegak”, “Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI” and “Bintang Mahaputra Adiprana II” from Government of the Republic of Indonesia.

b. Michael Kristianto Sutisna

Michael Kristianto Sutisna joined DBS Indonesia as Head of Rewards and Project Management Unit Head in 2012. He graduated with a Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from the University of Indonesia (1998).



Sebelum bergabung dengan DBS Indonesia, beliau bekerja di PT Kraft Foods Indonesia sebagai Human Resources Commercial Manager dan telah memiliki beberapa pengalaman di bidang Human Resources selama 15 tahun khususnya dalam bidang *Compensation and Benefits, Performance Management, HR Operations & System, Organization Development* dan Konsultan Sumber Daya Manusia. Beliau juga pernah menjadi ketua pengurus Dana Pensiun Coca Cola Amatil Indonesia.

c. Tan Kok Kiang Bernard Richard

Tan Kok Kiang Bernard Richard bergabung dengan DBS Group pada tahun 2008 dan diangkat sebagai Komisaris DBS Indonesia pada tahun 2009 sebelum akhirnya menjadi Presiden Komisaris DBS Indonesia pada tahun 2011.

Sebelum bergabung dengan DBS, beliau memiliki karir yang sukses dalam bidang militer dan pemerintahan, memegang beberapa posisi kepemimpinan.

Beliau seorang warga negara Singapura, memperoleh dua beasiswa bergengsi dari Singapura-Beasiswa Presiden dan Beasiswa Pascasarjana Lee Kuan Yew. Beliau menjalankan masa studinya di Inggris Raya dan Amerika Serikat. Beliau lulus dari *University of Birmingham* dalam bidang Ekonomi dan Ilmu Politik dan dari *Massachusetts Insitute of Technology*, Amerika Serikat dengan gelar Master dalam bidang Administrasi Bisnis.

Prior to his joining DBS Indonesia, he worked in PT Kraft Foods Indonesia as Human Resources Commercial Manager and has more than 15 years' experiences in Human Resources, in particular in Compensation and Benefits, Performance Management, HR Operations & Systems, Organizational Development and Human Resources Consultant. He was also Head of the Pension Fund of Coca Cola Amatil Indonesia.

c. Tan Kok Kiang Bernard Richard

Tan Kok Kiang Bernard Richard joined DBS Group in 2008, and prior to his appointment as President Commissioner of DBS Indonesia in 2011, he was appointed Commissioner of DBS Indonesia in 2009.

In his earlier career, prior to joining DBS, he led a successful career in the military and government and held a variety of leadership positions.

He is a Singaporean by nationality, won two of Singapore's prestigious scholarships-Presidential Scholarship and the Lee Kuan Yew Postgraduate Scholarship. He was educated both in the UK and the US. He graduated from the University of Birmingham, UK in Economics and Political Science and the Massachusetts Institute of Technology, US with a Master's in Business Administration.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
- (1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;
 - (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.
- b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- c) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi, Steffano Ridwan, untuk disampaikan kepada RUPS dan telah disetujui oleh pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 10 tanggal 3 September 2013. Pengangkatan tersebut telah dibahas dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.

3. Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2013, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan 4 rapat. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri oleh Bapak Prof. Subroto (4 kali), Bapak Bernard Richard (1 kali), dan Bapak Michael Sutisna (4 kali).

2. Implementation of Tasks and Responsibilities

- a) The Remuneration Committee has evaluated remuneration policy for the following:
- (1) the Board of Commissioners and the Board of Directors, and submitted its recommendations to GMS;
 - (2) Executive Officer and employees, and submitted its recommendations to the Board of Directors.
- b) In relation to nomination policy, the Committee has established system, nomination procedure and/ or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to be presented in the GMS
- c) Nomination Committee has provided a recommendation for the appointment of Steffano Ridwan to the Board of Directors, to be presented before GMS, and this was approved by the shareholders as stipulated in Deed of Resolutions of the Shareholders Number 10 dated 3 September 2013. This appointment was discussed in Remuneration and Nomination Committee meetings.

3. Frequency of Remuneration and Nomination Committee Meetings

In 2013, there were 4 meetings. The RNC meetings were attended and reviewed by Prof. Subroto (4 times), Mr. Bernard Richard (1 time), and Mr. Michael Sutisna (4 times).

V. Laporan Komite di Bawah Direksi

A. Komite Risiko Operasional

Komite ini dibentuk untuk mengawasi secara komprehensif dan memberikan arahan yang terkait dengan manajemen risiko operasional.

1. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Memonitor dan melakukan peninjauan ulang atas efektivitas kerangka, kebijakan, proses dan metodologi manajemen risiko operasional Bank.
- b. Melakukan penilaian dan monitoring terhadap eksposur risiko operasional yang kritikal secara *top-down*.
- c. Meninjau kembali isu risiko operasional yang kritikal dari Unit Bisnis, Unit pendukung dan cabang maupun isu yang dikemukakan oleh sub-komite dari Komite Risiko Operasional.
- d. Memberikan petunjuk atas penyelesaian isu risiko operasional yang kritikal dan memonitor penyelesaian isu tersebut.
- e. Memberikan informasi terkini kepada Direksi dan Grup Komite Risiko Operasional mengenai profil risiko operasional secara berkala.
- f. Melakukan eskalasi atas isu risiko operasional yang kritikal kepada Presiden Direktur, Direksi, Grup Komite Risiko Operasional dan komite lainnya yang relevan.
- g. Meninjau ulang kebijakan risiko operasional dan menyetujui perubahan kebijakan bila perubahan tersebut tidak bersifat substansial atau menyokong kebijakan tersebut untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.
- h. Menyetujui kerangka acuan dan perubahan-perubahannya dari *sub-*

V. Report of Committees under The Board Of Directors

A. Operational Risk Committee

The Operational Risk Committee (ORC) provides comprehensive location-wide oversight and direction relating to the management of operational risk.

1. Duties and Responsibilities

- a. Monitor and review the effectiveness of the Bank's Operational Risk Management Framework, policy, process, methodology and infrastructure.
- b. Perform top-down assessment and monitoring of critical operational risk exposure across the Bank.
- c. Review critical operational risk issues arising from business units, support units and branches, as well as issues highlighted by sub-committees of Operational Risk Committee.
- d. Provide direction for resolution of critical operational risk issues, and monitor issue resolution.
- e. Provide update for the Board of Directors and Group ORC regarding local operational risk profiles, on a regular basis
- f. Bring up critical operational risk issues to the President Director, Board of Directors Group ORC and/ or other relevant committees.
- g. Review operational risk policies and approve policy revisions where changes are not substantial. Otherwise, endorse these policies for further approval by the Board of Commissioners.
- h. Approve the terms of reference and changes thereof of the sub-

committees yang berada dalam pengawasan Komite ini;

- i. Membentuk dan membubarkan sub-komite apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Dokumen Otoritas persetujuan Bank dan/atau Tata kelola yang lainnya. Dalam hal terdapat hal yang bertentangan, pihak-pihak yang terkait akan dilibatkan dalam proses review dan pengambilan keputusan.

2. Susunan Anggota dan Rapat Komite

Susunan anggota Komite Risiko Operasional serta tingkat kehadiran dalam rapat di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Keanggotaan <i>Membership*</i>	Rapat <i>Meeting</i>	Hadir <i>Attendance</i>	% Kehadiran <i>% Attendance</i>
Kepala Group Manajemen Risiko <i>Head of Risk Management Group</i> (Ketua/ <i>Chairman</i>)	10	10	100%
Presiden Direktur <i>President Director</i>	10	8	80%
Kepala Institutional Banking <i>Head Institutional Banking</i>	10	9	90%
Kepala Consumer Banking <i>Head Consumer Banking</i>	10	10	100%
Kepala Departemen Hukum, Kepatuhan dan Sekretariat <i>Head of Legal, Compliance and Secretariat</i>	10	10	100%
Kepala Departemen Keuangan <i>Head of Finance</i>	10	9	90%
Kepala Departemen Teknologi dan Operasional <i>Head of Technology and Operation (T&O)</i>	10	9	90%
Kepala Kredit <i>Head of Credit</i>	10	8	80%
Kepala Treasury & Market <i>Head of Treasury & Market</i>	10	9	90%
Kepala Debt & Capital Market <i>Head of Debt and Capital Market</i>	10	7	70%
Internal Audit (Observer)	10	10	100%

Catatan/Note *: termasuk perwakilannya/*including the representative(s)*.

B. Komite Risiko Pasar Dan Risiko Likuiditas

Komite ini berperan sebagai forum eksekutif untuk melakukan diskusi dan mengambil keputusan terkait keseluruhan aspek risiko pasar dan risiko likuiditas beserta manajemennya.

committees under the oversight of ORC.

- i. Establish and dissolve sub-committees if required, subject to applicable provisions of the Bank's Approving Authority and/or other governance documents. In the event of conflict, relevant parties will be engaged in the review and decision process.

2. Membership and Meeting of Committee

List of members of Operational Risk Committee and their presence in meetings during 2013 is as follows:

B. Market And Liquidity Risk Committee

This committee serves as an executive forum for discussion and decisions of all aspects of market and liquidity risks and their management.

1. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Kerangka Kerja
 - (i) Melakukan pengawasan terhadap efektivitas infrastruktur manajemen risiko DBS Indonesia termasuk kerangka, kebijakan, model risiko pasar, manusia, proses, informasi, metodologi dan sistem manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas.
 - (ii) Memonitor dan melakukan peninjauan ulang kerangka risiko pasar dan risiko likuiditas dan infrastrukturnya termasuk efektivitas proses.
 - (iii) Sebagai forum eksekutif untuk melakukan diskusi dan mengambil keputusan terkait keseluruhan aspek risiko pasar dan risiko likuiditas beserta manajemennya.
- b. Kebijakan
 - (i). Menyokong kebijakan-kebijakan pokok risiko pasar dan risiko likuiditas sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Menyetujui petunjuk pelaksanaan/*guidelines* atas kebijakan terkait.
 - (ii). Menyokong kerangka yang terkait dengan risiko pasar dan kebijakan-kebijakan untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berikut perubahan-perubahannya.
 - (iii). Memberikan petunjuk atas permasalahan yang terkait dengan *New Products Approval* (NPA).
- c. Profil
 - (i). Memberikan pengawasan yang menyeluruh atas manajemen risiko pasar dan likuiditas

1. Tasks and Responsibilities

- a. Framework
 - (i) Maintain oversight on the effectiveness of DBS Indonesia risk management infrastructure, including framework, policies, market risk related models, people, processes, information, methodologies and systems on market and liquidity risks.
 - (ii) Monitor and review market & liquidity risk management framework and infrastructure, as well as effectiveness of processes.
 - (iii) As an executive forum for discussion and decisions on all aspects of market and liquidity risks and their management.
- b. Policies
 - (i) Endorse core market and liquidity risk policies before submission to the Board of Commissioners for approval. Approve associated policy guidelines.
 - (ii) Endorse market risk related framework and policies for approval by the Board of Commissioners, and be apprised of key changes.
 - (iii) Provide guidance on issues related to New Products Approval (NPA).
- c. Profiles
 - (i) Provide comprehensive and enterprise-wide oversight of all market and liquidity risks and

termasuk manajemennya dalam *trading* dan *banking books*.

- (ii). Melakukan peninjauan ulang dan menilai profil risiko pasar dan risiko likuiditas yang kritikal serta paparan dari risiko tersebut, posisi besar, tingkat kerentanan P&L Incidences, permasalahan yang material dan transaksi material yang melibatkan risiko pasar dan risiko likuiditas.
- (iii). Membuat standar dan memberikan petunjuk yang diperlukan dalam pembentukan dan pemeliharaan rencana kontinjensi likuiditas.

d. Batasan

- (i). Memberikan rekomendasi atas batasan toleransi risiko pasar inti dan menetapkan batasan tambahan kontrol risiko pasar.
- (ii). Menyetujui *appetite limits* atas risiko likuiditas berdasarkan delegasi kewenangan dari Dewan Komisaris dan menentukan kontrol limit risiko likuiditas dan/atau pemicunya.
- (iii). Melakukan ratifikasi atas kelebihan batasan dan menyetujui batasan penyesuaian berdasarkan delegasi kewenangan dari Dewan Komisaris.

2. Susunan Anggota dan Rapat Komite

Susunan anggota Komite Risiko Pasar dan Likuiditas serta tingkat kehadiran dalam rapat di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

their management in trading & banking books.

- (ii) Review and assess critical market and liquidity risk profiles and exposures, major positions, vulnerabilities, P&L incidences, material issues and major transactions involving market and liquidity risks.
- (iii) Set standards and provide necessary guidance on the establishment and maintenance of the liquidity contingency plan.

d. Limits

- (i) Recommend core market risk appetite limits and set supplementary market risk control limits.
- (ii) Approves liquidity risk appetite limits based on delegated authority from the Board of Commissioners, and prescribe liquidity risk control limits and/or triggers.
- (iii) Ratify limit excesses and approve limit adjustments based on delegated authority from the Board of Commissioners.

2. Membership and Meeting of Committees

List of members of Market and Liquidity Risk Committee and their presence in meetings during 2013 is as follows:

Keanggotaan Membership*	Rapat Meeting	Hadir Attendance	% Kehadiran % Attendance
Kepala Manajemen Risiko <i>Head of Risk Management</i> (Ketua/ Chairman)	10	10	100%
Presiden Direktur <i>President Director</i>	10	9	90%
Kepala Departemen Treasury and Market <i>Head of Treasury and Market</i>	10	10	100%
Kepala Departemen Keuangan <i>Head of Finance</i>	10	10	100%
Kepala Debt and Capital Market <i>Head of Debt and Capital Market</i>	10	10	100%
Internal Audit (observer)	10	10	100%

Catatan/Note *: termasuk perwakilannya/including the representative(s).

C. Komite Risiko Kredit

Komite ini berperan sebagai forum eksekutif untuk melakukan diskusi dan mengambil keputusan terkait dengan seluruh aspek risiko kredit berikut manajemennya untuk memastikan bahwa Bank senantiasa patuh terhadap kebijakan kredit dan untuk memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik terkait dengan seluruh keputusan kredit yang telah diambil.

1. Tugas dan Tanggung Jawab

- (i) Menyokong kebijakan kredit yang ada di Bank dan/atau mengesahkan kebijakan-kebijakan pokok yang terkait dengan kredit sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
- (ii) Menilai timbal balik risiko terhadap keuntungan yang ada di Bank, termasuk kriteria kredit yang sesuai untuk ekspansi, metodologi alokasi aset dan/atau target kredit yang spesifik sesuai dengan risiko yang diambil.
- (iii) Melakukan identifikasi, mengukur dan memonitor portfolio risiko kredit DBS Indonesia (baik yang lancar maupun potensial).
- (iv) Mengidentifikasi, mengukur and memonitor kecukupan, akurasi dan keefektifan dari sistem kredit untuk manajemen risiko kredit dan kontrol terhadap risiko kredit.

C. Credit Risk Committee

This Committee serves as an executive forum for discussion and decisions on all aspects of credit risk and its management to ensure the Bank is complying with its Credit Policy and to ensure proper implementation of good corporate governance in the Bank with regard to all credit decisions.

1. Duties and Responsibilities

- (i) Endorse bank-wide credit policies and/or endorse core credit-related policies before submission to Board of Commissioner for approval.
- (ii) Assess the risk-return trade offs across the Bank, including credit criteria applicable to expansion, asset allocation methodologies and/or specific loan targets commensurate with risk taken.
- (iii) Identify, measure and monitor DBS's credit risk portfolio (both current and potential);
- (iv) Identify, assess and monitor the adequacy, accuracy and effectiveness of credit systems for credit risk management and credit risk control.

- (v) Mengidentifikasi konsentrasi kredit yang spesifik pada bisnis atau group atau level sektor tertentu dan tren kredit yang berpengaruh pada portfolio. Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk mengelola risiko yang teridentifikasi.
- (vi) Melakukan analisis berbagai permasalahan yang berpengaruh pada toleransi risiko di negara dimana Bank berada beserta profilnya, termasuk strategi Bank terhadap regionalisasi, pengukuran secara tepat bagi risiko dan kesempatan-kesempatan serta keperluan-keperluan yang berhubungan dari berbagai unit bisnis atas alokasi limit.
- (vii) Melakukan pengawasan yang aktif untuk memastikan kesesuaian sistem *rating*, proses parameterisasi, penggunaan sistem *rating* dan memprediksikan parameter.
- (viii) Melakukan pengawasan aktif untuk memastikan kesesuaian *stress testing* berdasarkan tanggung jawabnya dari waktu ke waktu dan mendokumentasikannya dalam Kebijakan Kredit berkaitan dengan *Stress Testing*.
- (ix) Melakukan peninjauan ulang atas kesesuaian kerangka yang ada dengan Sistem Swift Alliance untuk memastikan standar dari otoritas yang relevan telah terpenuhi, termasuk pelaksanaan *control self assessment* bila diperlukan.

- (v) Identify specific credit concentrations at business or group or sector level and credit trends affecting the portfolio. Implement necessary policies and procedures to manage identified risks.
- (vi) Analyse the different issues affecting the Bank's country risk appetite and profile, including the Bank's strategy towards regionalization, the right-sizing of risks and opportunities, and the relative needs of different business units for limit allocation.
- (vii) Exercise active oversight to ensure the continuing appropriateness of rating systems, the parameterization process, the use of rating systems and estimates of parameters.
- (viii) Exercise active oversight to ensure continuing appropriateness of stress testing, in accordance with the responsibilities from time to time, and as documented in the Credit Stress Testing Policy.
- (ix) Undertake the review of the suitability of both new and existing framework and Swift Alliance System to ensure their suitability in meeting the standards of the relevant authority, including the performance of control self assessment, where appropriate.

2. Susunan anggota dan Rapat Komite

Susunan anggota Komite Risiko Kredit serta tingkat kehadiran dalam rapat di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

2. Membership and Meetings of Committees

List of members of Credit Risk Committee and their presence in meetings during 2013 is as follows:

Keanggotaan Membership*	Rapat Meeting	Hadir Attendance	% Kehadiran % Attendance
Kepala Grup Manajemen Risiko Head of Risk Management Group (Ketua/ Chairman)	11	11	100%
Presiden Direktur President Director	11	11	100%
Kepala Institutional Banking Group 1&2 Head of Institutional Banking Group 1&2	11	10	90.9%
Kepala Institutional Banking Group 3&4 Head of Institutional Banking Group 3&4	11	10	90.9%
Kepala Consumer Banking Group Head of Consumer Banking Group	11	8	72.7%
Kepala Departemen Kredit Head of Credit	11	10	90.9%
Kepala Kredit Konsumer Head of Consumer Credit	11	10	90.9%
Kepala Unit Manajemen Risiko Kredit Head of Credit Risk Management	11	8	72.7%
Kepala Credit Control Unit Head of Credit Control Unit	11	11	100%
Kepala Special Asset Management Head of Special Asset Management	11	7	63.6%
Internal Audit (observer)	11	11	100%

Catatan/Note *: termasuk perwakilannya/including the representative(s).

D. Komite Asset and Liability (ALCO)

ALCO dibentuk untuk mengawasi kualitas dan stabilitas *Net Interest Margin* (NIM), manajemen likuiditas dan struktural *Foreign Exchange / Interest Rate* (FX/IR) manajemen.

1. Tugas dan Tanggung Jawab

- (i) Meninjau ulang, mengawasi dan menyetujui strategi neraca secara keseluruhan, yang termasuk didalamnya antara lain harga, likuiditas dan manajemen permodalan.
- (ii) Menyetujui proposal-proposal bisnis, pricing untuk produk bagi masyarakat luas, mengadministrasikan pemberian harga dan *pricing internal* (Fund Transfer Pricing).
- (iii) Meninjau ulang dan menyetujui model yang dipergunakan untuk mengkararakteristikan *repricing* dan kebiasaan nasabah.
- (iv) Meninjau ulang dan menyetujui kebijakan *Asset Liability Management* (ALM), kebijakan *Fund Transfer Pricing* dan memberikan mandat dan

D. Asset And Liability Committee (ALCO)

ALCO is established to oversee the quality and stability of Net Interest Margin (NIM), liquidity management, and structural Foreign Exchange / Interest Rate (FX/IR) management.

1. Duties and Responsibilities

- (i) Review, oversee and approve the overall Balance Sheet strategy, involving pricing, liquidity and capital management.
- (ii) Approve business proposals, pricing for mass-market products (including setting administered rates, e.g., Prime, board, deposit rates), and internal pricing mechanisms (e.g. Fund Transfer Pricing (FTP)).
- (iii) Review and approve models used to characterize re-pricing and customer behavior.
- (iv) Review and approve Asset Liability Management (ALM) policy, FTP policy, as well as provide mandates & parameters to Central Mismatch

parameter untuk *Central Mismatch Unit* dan *Liquidity Management Unit* (apabila diperlukan).

- (v) Memantau pengawasan dan kontrol dari pergerakan pendapatan bunga bersih serta kerentanan dibawah kondisi pasar yang tidak menentu.

Unit and Liquidity Management Unit (whenever applicable)

- (v) Oversee the monitoring and control of NII volatility and vulnerability under stressful market conditions

2. Susunan Anggota dan Rapat Komite

Susunan anggota Komite Asset and Liability serta tingkat kehadiran dalam rapat di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

2. Membership and Meetings of Committees

List of members of Asset and Liability Committee and their presence in meetings during 2013 is as follows:

Keanggotaan <i>Membership*</i>	Rapat <i>Meeting</i>	Hadir <i>Attendance</i>	% Kehadiran <i>% Attendance</i>
Presiden Direktur <i>President Director</i> (Ketua/ <i>Chairman</i>)	13	13	100%
Kepala Departemen Keuangan <i>Head of Finance</i>	13	13	100%
Kepala Manajemen Risiko <i>Head of Risk Management</i>	13	13	100%
Kepala <i>Treasury and Market</i> <i>Head of Treasury and Market</i>	13	10	76.9%
Kepala Debt and Capital Market <i>Head of Debt and Capital Market</i>	13	10	76.9%
Kepala <i>Institutional Banking 1 dan 2</i> <i>Head of Institutional Banking 1 and 2</i>	13	13	100%
Kepala <i>Institutional Banking 3 dan 4</i> <i>Head of Institutional Banking 3 and 4</i>	13	11	84.6%
Kepala <i>Consumer Banking</i> <i>Head of Consumer Banking</i>	13	12	92.3%
Kepala <i>Global Transaction Services</i> <i>Head of Global Transaction Services</i>	13	12	100%

Catatan/Note *: termasuk perwakilannya/including the representative.

E. Business Control Committee (BCC)

Komite ini berperan dalam melakukan pengawasan atas keseluruhan risiko yang hadir di dari aktivitas unit bisnis termasuk proses yang terjadi dari awal sampai akhir. Untuk membantu efektivitas manajemen risiko pada unit bisnis, fokus dari BCC adalah identifikasi, pemantauan dan penyelesaian permasalahan terkait kontrol/risiko.

E. Business Control Committee (BCC)

This Committee provides oversight of all key risks arising in Business Unit activities, including end-to-end processes. To assist the effective management of risks in Business Units, focus of BCC would be on identification, monitoring and resolution of control issues/risks.

1. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Melakukan pemantauan dan peninjauan ulang atas efektivitas kontrol risiko yang memiliki akibat kepada bisnis.
- b. Melakukan peninjauan ulang atas permasalahan/risiko operasional yang material dari unit bisnis maupun unit pendukung.
- c. Mendiskusikan permasalahan utama/tantangan dan peninjauan ulang atas statistik risiko utama, kejadian-kejadian penting dan bisnis yang memiliki dampak sehingga berakibat pada kerugian finansial maupun reputasi.
- d. Memberikan arahan bagi penyelesaian permasalahan/risiko operasional dan memonitor penyelesaian tersebut.
- e. Memberikan informasi terkini pada Direksi atau komite risiko yang relevan atau Dewan Komisaris mengenai permasalahan yang signifikan apabila diperlukan.

2. Susunan Anggota dan Rapat Komite

Susunan anggota masing-masing Business Control Committee serta tingkat kehadiran dalam rapat di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

(i) Business Control Committee Treasury and Market

Keanggotaan Membership*	Rapat Meeting	Hadir Attendance	% Kehadiran % Attendance
Kepala Treasury and Market Head of Treasury and Market	4	4	100%
Kepala Manajemen Risiko Head of Risk Management	4	4	100%
Kepala Treasury and Market-BMS Head of Treasury and Market-BMS	4	4	100%
Kepala Treasury and Market Operation Head of Treasury and Market Operation	4	4	100%

1. Duties and Responsibilities

- a. Monitor and review effectiveness of risk controls impacting the business.
- b. Review material operational issues/risks arising from its Business and Support units.
- c. Discuss key issues/challenges and review key risk statistics, major events and business impact resulting in financial and reputational losses.
- d. Provide direction for resolution of material operational issues/risks and monitor issue resolution.
- e. Apprise the Board of Directors or relevant risk committees or the Board of Commissioners of significant issues, as appropriate.

2. Membership and Meetings of Committees

List of members of each Business Control Committee and their presence in meetings during 2013 is as follows:

(i) Business Control Committee Treasury and Market

Keanggotaan Membership*	Rapat Meeting	Hadir Attendance	% Kehadiran % Attendance
Kepala Treasury and Market Head of Treasury and Market	4	4	100%
Kepala Manajemen Risiko Head of Risk Management	4	4	100%
Kepala Treasury and Market-BMS Head of Treasury and Market-BMS	4	4	100%
Kepala Treasury and Market Operation Head of Treasury and Market Operation	4	4	100%

Keanggotaan Membership*	Rapat Meeting	Hadir Attendance	% Kehadiran % Attendance
Kepala Departemen Kredit <i>Head of Credit</i>	4	4	100%
Kepala Unit Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas <i>Head of Market and Liquidity Risk Management</i>	4	4	100%
Kepala Hukum, Kepatuhan dan Sekretariat <i>Head of Legal, Compliance and Secretariat</i>	4	4	100%
Internal Audit	4	4	100%

Catatan/Note *: termasuk perwakilannya/including the representative(s).

**(ii) Business Control Committee Perbankan
Korporasi**

**(ii) Business Control Committee,
Institutional Banking**

Keanggotaan Membership*	Rapat Meeting	Hadir Attendance	% Kehadiran % Attendance
Kepala <i>Institutional Banking</i> <i>Head of Institutional Banking</i>	11	11	100%
<i>Business Chief Operating Officer</i>	11	11	100%
Kepala Departemen Hukum dan Kepatuhan <i>Head of Legal and Compliance</i>	11	11	100%
Kepala <i>Institutional Banking</i> 3 dan 4 <i>Head of Institutional Banking 3 and 4</i>	11	11	100%
<i>Unit Operational Risk Manager- Institutional Banking</i>	11	11	100%
Kepala <i>Institutional Banking Liabilities</i> <i>Head of Institutional Banking Liabilities</i>	11	11	100%
Kepala <i>Institutional Banking Account Management Head of Institutional Banking Account Management</i>	11	11	100%
Kepala Departemen Kredit <i>Head of Credit</i>	11	11	100%
Perwakilan dari Cabang <i>Representative from Branches</i>	11	11	100%
Kepala <i>Risk Management</i> <i>Head of Risk Management</i>	11	11	100%
Kepala <i>Technology and Operation</i> <i>Head of Technology and Operation</i>	11	11	100%
Internal Audit	11	11	100%

Catatan/Note *: termasuk perwakilannya/including the representative(s).

(iii) **Business Control Committee**
Perbankan Konsumer

(iii) **Business Control Committee,**
Consumer Banking

Keanggotaan Membership*	Rapat Meeting	Hadir Attendance	% Kehadiran % Attendance
Kepala Consumer Banking <i>Head of Consumer Banking</i>	9	9	100%
Kepala Manajemen Risiko <i>Head of Risk Management</i>	9	9	100%
Kepala Departemen Hukum dan Kepatuhan <i>Head of Legal and Compliance</i>	9	9	100%
Kepala <i>Technology and Operation</i> <i>Head of Technology and Operation</i>	9	9	100%
Kepala Departemen Sumber Daya Manusia <i>Head of Human Resource</i>	9	5	55.5%

Catatan/Note *: termasuk perwakilannya/including the representative(s).

F. IT Steering Committee

Komite ini bertugas untuk memberikan pengawasan secara menyeluruh terhadap aspek teknologi informasi Bank dan memastikan bahwa kebijakan dan implementasi telah dilaksanakan untuk menjaga standar pengelolaan risiko dan kepatuhan sesuai dengan kebijakan Grup dan peraturan perundangan.

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite ini bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan:

- Strategi Teknologi Informasi berdasarkan Rencana Bisnis Bank;
- Kesesuaian antara proyek di bidang teknologi informasi yang telah disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
- Kesesuaian antara aplikasi proyek teknologi informasi dengan kontrak proyek;
- Kesesuaian antara teknologi informasi dengan persyaratan sistem manajemen informasi dan bisnis Bank;
- Efektivitas langkah yang diambil untuk meminimalkan risiko investasi

F. IT Steering Committee

This Committee provides oversight of overall Information Technology aspects in the Bank and ensure policies and practices are in place to maintain risk management and compliance standards aligning to internal Group policies and local regulation requirements.

1. Duties and Responsibilities

This Committee is responsible for providing recommendation to the Board of Directors in relation to:

- The Information Technology strategic plan in line with the Bank's business strategic plan
- The suitability of approved Information Technology projects and the Information Technology strategic plan.
- The suitability between the implementation of Information Technology projects and the project charter plan.
- The suitability of the Information Technology with the needs of the management information system and the needs of the Bank's business activities
- The effectiveness of the actions to minimize the risks on the Bank's

pada Bank dalam hal sektor teknologi informasi sehingga investasi tersebut dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan Bank;

- f. Pengamatan atas performa dari teknologi informasi dan usaha peningkatannya;
- g. Usaha untuk menyelesaikan permasalahan terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh unit pengguna dan unit Teknologi Informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu.

investment in Information Technology sector, so that the investment contributes to the achievement of the bank's business purposes.

- f. The monitoring of Information Technology performance and the efforts to improve it.
- g. The efforts of settlement of various issues related to Information Technology, which cannot be settled by the user's unit and the Information Technology (TI) unit effectively, efficiently and on a timely basis.

2. Susunan Anggota dan Rapat Komite

Susunan anggota IT *Steering Committee* serta tingkat kehadiran dalam rapat di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

2. Membership and Meeting of Committee

List of member of IT *Steering Committee* and their presence in meetings during 2013 is as follows:

Keanggotaan <i>Membership*</i>	Rapat <i>Meeting</i>	Hadir <i>Attendance</i>	% Kehadiran <i>% Attendance</i>
Presiden Direktur <i>President Director</i>	4	4	100 %
Kepala Manajemen Risiko <i>Head of Risk Management</i>	4	3	75%
Kepala IT <i>Head of IT</i>	4	4	100%
Kepala <i>Consumer Banking</i> <i>Head of Consumer Banking</i>	4	4	100%
Kepala Departemen Keuangan <i>Head of Finance</i>	4	4	100%
Kepala <i>Institutional Banking</i> <i>Head of Institutional Banking</i>	4	4	100%
Kepala Departemen Hukum, Kepatuhan dan Sekretariat <i>Head of Legal, Compliance and Secretariat</i>	4	3	75%
Kepala <i>Treasury and Market</i> <i>Head of Treasury and Market</i>	4	3	75%

Catatan/Note *: termasuk perwakilannya/including the representative(s).

VI. Kebijakan/Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2013, kewenangan

VI. Policies/Package of Remuneration and Other Facilities Received by The Board of Directors and The Board of Commissioners

In accordance with prevailing regulations, remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners are determined by the General Meeting of Shareholders. In the Shareholders Resolution in lieu of Annual General Meeting of Shareholders year 2013,

untuk menentukan besarnya remunerasi yang diberikan kepada Direksi sampai dengan jumlah tertentu didelegasikan kepada Dewan Komisaris.

Remunerasi yang diberikan kepada Direksi ditentukan pada pencapaian *Key Performance Indicator* bagi Direksi. Sementara remunerasi bagi Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan pelaksanaan kewajiban mereka dalam mengawasi kinerja Direksi. Disamping didasarkan pada pencapaian *Key Performance Indicator*, remunerasi yang diberikan juga diukur dengan industri perbankan yang lainnya untuk menjaga keseluruhan remunerasi yang kompetitif.

Seperti telah disetujui dalam Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2013, anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima paket remunerasi sebagai berikut:

the authority to determine remuneration granted to the Board of Directors up to a certain amount is determined by the Board of Commissioners.

Remuneration for the Board of Directors is given in accordance in relation to achievements of the Board of Directors' Key Performance Indicators, while remuneration for the Board of Commissioners is determined in accordance with implementation of supervisory duties towards management. Further, it is determined by the achievement of Key Performance Indicators; remuneration given is also benchmarked against the local market as a tool to maintain overall competitiveness of remuneration.

As approved in Shareholders' Resolutions in lieu of Annual General Meeting of the Shareholders in 2013, members of the Board of Directors and Commissioners received the following remuneration packages:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya <i>Types of Remuneration and Other Facilities</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
	Jumlah Orang <i>Number of Persons</i>	Jutaan Rp <i>Million IDR</i>	Jumlah Orang <i>Number of Persons</i>	Jutaan Rp <i>Million IDR</i>
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) <i>Range of gross remuneration (salaries, bonuses, allowances and other facilities in cash)</i>	4	10.000 - 15.000	6	15.000 - 25.000
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb.) <i>Range of other in kind facilities (housing, transportation, medical insurance and other benefits)</i>	4	<650	6	1.000-2.000
Jumlah Diterima per orang dalam 1 Tahun <i>Remuneration total per-person in 1 year</i>			Jumlah Direktur <i>Number of Directors</i>	Jumlah Komisaris <i>Number of Commissioners</i>
Lebih dari Rp3,5 milyar / <i>More than IDR 3.5 billion</i>			-	2
Lebih dari Rp1,5 milyar – Rp3,5 milyar / <i>More than IDR 1.5 billion – IDR 3.5 billion</i>			6	-
Rp500 juta – Rp1,5 milyar / <i>IDR 500 million – IDR 1.5 billion</i>			-	2

VII. Kepemilikan Saham dan Opsi Saham

Dalam tahun 2013, DBS Indonesia tidak memiliki skema insentif untuk para direktur dan karyawan senior untuk memiliki saham DBS Indonesia melalui Opsi Saham Karyawan (*Employees share Option/ESOP*) atau opsi yang menguntungkan untuk membeli saham Bank yang baru dikeluarkan.

Sebagai wujud transparansi dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, anggota Direksi dan Komisaris diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih pada Bank atau perusahaan lainnya baik di dalam dan di luar negeri. Adapun kepemilikan saham dalam jumlah tersebut oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris DBS Indonesia adalah sebagai berikut:

VII. Shareholding and Share Options

As of 2013, DBS Indonesia did not have any incentive scheme for Directors or senior employees to own shares of DBS Indonesia through an Employees Share Option (ESOP) or rewarding options to purchase any Bank's new shares issued.

As a realisation of transparency and in order to comply the provision of Bank Indonesia regulations concerning implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to disclose the share ownership in the amount of a minimum of 5% in the Bank or other companies, both within and outside the territory of Republic of Indonesia. Share ownership of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of DBS Indonesia for that respective amount are as follows:

Nama Name	Kepemilikan saham lebih dari 5% atau modal disetor pada <i>Share ownership 5% or more of paid in capital at</i>				Keterangan Remarks
	PT Bank DBS Indonesia	Perusahaan Lain Other Companies	Bank Lain Other Bank	Institusi Keuangan Bukan Bank Non-Bank Financial Institutions	
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>					
Tan Kok Kiang Bernard* Richard	-	-	-	-	-
Lim Chu Chong	-	-	-	-	-
Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat	-	-	-	-	-
Prof. Dr. Subroto	-	-	-	-	-
Direksi <i>Board of Directors</i>					
Teo Tzai Win Melvin	-	-	-	-	-
Adrianus Dani Prabawa**	-	-	-	-	-
Satia Indrarini	-	-	-	-	-
Mahdan Ibrahim	-	-	-	-	-
Jeny Gono	-	-	-	-	-
Steffano Ridwan	-	-	-	-	-

* Mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris efektif sejak 26 Februari 2014
Resigned as President Commissioner with effective date as of 26 February 2014

** Mengundurkan diri sebagai Direktur efektif sejak 7 Januari 2014
Resigned as Director with effective date as of 7 January 2014

VIII. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah di DBS Indonesia tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Jenis Rasio / Type of Ratios	Rasio/ Ratios
Gaji Karyawan-tertinggi ke terendah <i>Employee Salaries-highest to lowest</i>	100.4
Gaji Direktur-tertinggi ke terendah <i>Directors Salaries-highest to lowest</i>	3.1
Gaji Komisaris-tertinggi ke terendah <i>Commissioners Salaries-highest to lowest</i>	4.2
Gaji tertinggi Direktur-gaji tertinggi karyawan <i>Highest Director Salary-highest employee salary</i>	1.7

IX. Kecurangan Internal

Kecurangan internal adalah pelanggaran/tingkah laku yang salah yang dilakukan oleh anggota manajemen, karyawan permanen dan/atau bukan permanen sehubungan dengan proses dan operasional Bank, yang mengakibatkan potensi sejumlah kewajiban atau kerugian dalam jumlah berapa pun.

Dalam tahun 2013, tidak terdapat kasus kecurangan internal yang terjadi di DBS Indonesia

VIII. Ratios of The Highest to Lowest Salaries

The ratios of highest and lowest salaries at DBS Indonesia in 2013 are as follows:

IX. Internal Fraud

Internal fraud is any violation/misconduct committed by members of management, permanent and/or non-permanent staff related to the Bank's processes and operations, which may cause potential liabilities or losses in any amount.

In 2013, no internal fraud cases were apprehended within DBS Indonesia.

Internal Fraud dalam 1 tahun <i>Internal Fraud in 1 year</i>	Jumlah kasus yang melibatkan <i>Number of cases involving</i>		
	Manajemen <i>Management</i>	Pegawai Tetap <i>Permanent Employees</i>	Pegawai Honorer/ <i>Non-Permanent Employees</i>
Jumlah kasus kecurangan <i>Total cases of fraud</i>	-	-	-
Kasus yang telah diselesaikan <i>Cases has been settled</i>	-	-	-
Penyelesaian internal sedang berlangsung <i>Internal settlement in progress</i>	-	-	-
Penyelesaian belum berlangsung <i>Settlement not yet in progress</i>	-	-	-
Tindak lanjut dalam proses hukum <i>In follow up in legal process</i>	-	-	-

X. Kasus Hukum

Selama tahun 2013, Bank memiliki 1 (satu) kasus baru dimana Bank menjadi Tergugat dalam suatu kasus hukum.

Di bawah ini adalah perincian kasus hukum selama tahun 2013:

X. Legal Cases

In 2013, the Bank has been involved in 1 (one) new legal case where the Bank became the defendant.

The followings are the details of legal cases in 2013:

Total		Pidana Criminal cases
Kasus Hukum Legal Cases	Perdata Civil cases	
Dengan karyawan / Related to staff	-	-
Selesai / Concluded	-	-
Dalam Proses / In progress of settlement	-	-
Terkait pemberian pinjaman/ Related to granting of credit facilities*	2 cases	-
Selesai / Concluded	-	-
Dalam Proses / In process of settlement	2 cases	-
Kepailitan / Bankruptcy lawsuits	-	-
Selesai / Concluded	-	-
Dalam Proses / In process of settlement	-	-
Lain-lain / Other lawsuits	1 case	-
Selesai / Concluded	-	-
Dalam Proses / In process of settlement	1 case	-

* Kasus ini terjadi di tahun 1995 dimana PT Bank DBS Indonesia menjadi Tergugat dalam kasus tersebut. Saat ini PT Bank DBS Indonesia sedang menunggu putusan dari Mahkamah Agung/This case happened in 1995, in which PT Bank DBS Indonesia became the Defendant. Currently PT Bank DBS Indonesia is awaiting a decision from the Supreme Court

XI. Transaksi yang Menyebabkan Benturan Kepentingan

Bank secara konsisten menghargai integritas individu dan profesionalisme seperti disebutkan dalam Kode Etik dan Tingkah Laku yang harus diperhatikan segenap Direksi dan karyawan. Semua direktur dan karyawan setiap tahun menandatangani Kode Etik dan Tingkah Laku Bank. Semua karyawan juga mengikuti pelatihan berkaitan dengan Kode Etik dan Tingkah Laku ini.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum disebutkan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif diharapkan menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi dimana terdapat benturan kepentingan. Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak terkait dengan Bank. Dalam keadaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif harus mengambil keputusan yang mengandung

XI. Transactions Causing Conflict of Interest

The Bank consistently values personal integrity and professionalism as set forth in its Codes of Ethics and Conduct, in which the Board of Directors and Bank employees are obliged to conform. All directors and employees have signed the Bank's Codes of Ethics and Conduct, on an annual basis. All staff has also undergone training related to Code of Ethics and Conduct.

Furthermore, in accordance with Bank Indonesia regulations concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, it is stipulated that a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Executive Officers are expected to avoid from making any decision in situations and conditions where a conflict of interest exists. A conflict of interest is a situation where there is a difference between the Bank's economic interest with the economic interest of the owner, member of the Board of Director, the Board of Commissioners, Executive Officer and/or related party of the Bank. In case a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Executive Officer shall make a decision entailed in a conflict of interest,

benturan kepentingan, pihak-pihak tersebut wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Dalam tahun 2013 tidak terdapat transaksi yang menyebabkan benturan kepentingan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Pejabat Eksekutif yang menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank.

XII. Pembelian Kembali Saham dan Pembelian Kembali Obligasi

Dalam tahun 2013 tidak terdapat transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk membeli kembali saham atau obligasi. Sehubungan dengan transaksi semacam ini, Bank akan selalu merujuk kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku.

XIII. Dana untuk Aktivitas Sosial dan Politik Termasuk Nama-Nama Penerima Dana

Bank tidak pernah memberikan dana untuk aktivitas politik manapun.

Namun demikian, Bank telah melaksanakan tanggung jawab sosial korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai Perseroan Terbatas. Program *Corporate Social Responsibility* DBS Indonesia ditopang oleh DBS Group, dan telah secara konsisten dilaksanakan sejak tahun 2007. Laporan program CSR ini dibuat terpisah dan bisa dilihat dalam laporan tahunan Bank tahun 2013.

those parties must give priority to the Bank's economic interest and avoid any potential losses or potential of reduced gain for the Bank and shall disclose that they are in a conflict of interest when making such a decision.

In 2013 there was no transaction which involved any conflict of interest by Commissioners, Directors, Executive Officers or staff, which might result in losses or reduced profit to the Bank.

XII. Share Buyback / Bond Buyback

In 2013 there were no transactions made by the Bank to buy back any shares or obligations. With regard to such transactions, if any, the Bank would always refer to applicable laws and regulations.

XIII. Fund for Social and Political Activities Including Names of Beneficiaries

The Bank never provides funds to any political activity.

However, the Bank has conducted Corporate Social Responsibility efforts pursuant to the Law concerning Limited Liability Companies. The Corporate Social Responsibility program held by DBS Indonesia has been supported by DBS Group and was started in 2007. A report of this CSR program is produced separately and can be referred to the Bank's 2013 Annual Report.

XIV. Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal

1. Fungsi Kepatuhan Bank

Bisnis perbankan dibangun berdasarkan kepercayaan dan integritas. Agar tetap berhasil, Bank menjaga ketat dan meningkatkan reputasi dan modal Bank. Pemeliharaan budaya kepatuhan yang kuat adalah pondasi keberhasilan Bank. Budaya kepatuhan bank dapat dianggap telah berjalan dengan baik bila setiap karyawan telah menyadari dan menerima tanggung jawab untuk terus menerus patuh pada undang-undang, peraturan dan standar etika. Hal ini telah ditanamkan dalam pikiran dan kebiasaan bekerja setiap karyawan.

Untuk mencapai tujuan di atas, Departemen Kepatuhan telah membuat buku petunjuk Kepatuhan yang berfungsi sebagai petunjuk yang menjelaskan cakupan, prinsip dan tanggung jawab untuk manajemen yang efektif atas hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank.

a. Direktur Kepatuhan

Departemen Kepatuhan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditugaskan untuk menjadi Direktur Kepatuhan Bank. Kualifikasi, tugas-tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan telah disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan dibawah ini:

- (i) Tidak menduduki jabatan rangkap sebagai Presiden Direktur Bank;
- (ii) Tidak bertanggungjawab atas aktivitas operasional, akunting dan/ atau Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI");

XIV. Compliance, Internal Audit and External Audit Functions

1. The Bank's Compliance Function

The banking business is founded on trust and integrity. In order to continue the success the Bank has closely guarded and enhanced its reputation and capital. The maintenance of a strong compliance culture is the strong foundation of the Bank's success. The Bank's compliance culture is considered well-established when every staff member is aware of and accepts responsibility for ongoing compliance with laws, regulations and ethical standards. This has been ingrained and become working habit of every staff member.

To achieve the above-mentioned objectives, the Compliance Department has established a Compliance Manual which serves as a guideline for defining the scope, principles and responsibilities for effective management of the Bank's compliance affairs.

a. Compliance Director

The Compliance Department is led by a member of the Board of Directors assigned to be the Compliance Director of the Bank. The qualifications, duties and responsibilities of the Compliance and Compliance Director have been in line with prevailing Bank Indonesia regulations.

The Bank's Compliance Director has complied with the following requirements:

- (i) Does not hold a concurrent position as President Director of the Bank;
- (ii) is not in charge of operational activities, accounting and/or internal audit working unit ("SKAI");

- (iii) Memahami peraturan Bank Indonesia dan Undang-undang serta peraturan lainnya; dan,
- (iv) Memiliki kemampuan untuk bekerja secara independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (i) Menentukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi semua peraturan Bank Indonesia dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku lainnya sehubungan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
- (ii) Memantau dan memastikan bahwa operasional bisnis Bank tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku;
- (iii) Memantau dan memastikan kepatuhan Bank atas semua perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank dengan Bank Indonesia; dan,
- (iv) Memantau dan memastikan kepatuhan Bank atas semua hal yang ditentukan dalam Kerangka kerja Kepatuhan DBS Indonesia.

Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktur/Departemen Kepatuhan, Direksi dan manajemen DBS Indonesia juga mempunyai tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa bisnis yang mereka lakukan telah memenuhi undang-undang, peraturan dan standar kepatuhan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban tersebut, Direktur Kepatuhan harus mencegah anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank dari mengikuti kebijakan dan/atau mengambil keputusan

- (iii) Possesses a good understanding of Bank Indonesia regulations and other prevailing laws and regulations; and,
- (iv) Capable of working independently.

b. Tasks and Responsibilities

The Compliance Director has duties and responsibilities as follows:

- (i) Determining the measures needed to ensure that the Bank has complied with all Bank Indonesia regulations and other prevailing laws and regulations pertaining to the implementation of prudential principles;
- (ii) Monitoring and ensuring that the business operations of the Bank do not deviate from prevailing regulations;
- (iii) Monitoring and ensuring the compliance of the Bank with all agreements and commitments made by the Bank with Bank Indonesia; and,
- (iv) Monitoring and ensuring the Bank's compliance with all matters stipulated under DBS Indonesia Compliance Framework.

Compliance with prevailing laws and regulations should not be borne solely by the Compliance Director/Department, as the Board of Directors and management have the primary responsibility of ensuring that the business they manage always complies with applicable laws, regulations and compliance standards.

In conducting the above-mentioned duties and responsibilities, the Compliance Director has been required to prevent members of the Board of Directors and/or executive officers of the Bank from pursuing

yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia, Kebijakan Kepatuhan yang dikeluarkan oleh pemegang saham pengendali dan/atau undang-undang dan peraturan yang berlaku lainnya. Apabila Direktur Kepatuhan menemukan kebijakan dan/atau keputusan yang dibuat oleh Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank yang menurut pendapatnya menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku lainnya, Direktur Kepatuhan harus memberitahukan hal tersebut kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari setelah pelaksanaan kebijakan/keputusan tersebut.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Unit Kepatuhan yang merupakan unit independen dari unit kerja operasional. Dalam melaksanakan tugasnya, unit kepatuhan turut meninjau kebijakan dan prosedur baru untuk memastikan bahwa kebijakan, petunjuk dan prosedur Bank telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang relevan dan/atau undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Direktur Kepatuhan telah memberikan laporan berkala tiap kuartal mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

2. Auditor Eksternal

Bank telah menunjuk kembali kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PwC Global Network, sebagai auditor eksternal Bank untuk tahun 2013.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku, Direksi juga telah membentuk Satuan Kerja Internal Audit (untuk selanjutnya

policies and/or adopting decisions that deviate from Bank Indonesia regulations, Compliance Policies issued by substantial shareholders and/or other prevailing laws and regulations. When the Compliance Director discovers a policy and/or decision made by the Board of Directors or executive officers of the Bank which, according to his opinion has deviated from prevailing laws and regulations, the Compliance Director should notify Bank Indonesia at the latest 7 days after the implementation of the policy/decision.

In order to support the effective performance of the Compliance Director function, the Bank has established a compliance unit, independent from operational work units. The compliance unit participates in reviewing new policies and guidelines to ensure that the Bank's policies, guidelines and procedures are in line with the relevant Bank Indonesia regulations and/or prevailing laws and regulations.

In accordance with prevailing Bank Indonesia regulations, the Compliance Director has provided quarterly reports on the performance of his duties and responsibilities to the President Director with a copy to the Board of Commissioners.

2. External Auditor

The Bank has reappointed Tanudiredja, Wibisana & Rekan, a member firm of PwC Global Network as the Bank's external auditor for year 2013.

In line with the prevailing Bank Indonesia regulations, the Board of Directors has also established the Bank's Internal Audit Working

disebut sebagai "SKAI") Bank. Direksi menyadari pentingnya proses audit dan mengkomunikasikan pentingnya fungsi ini.

Direksi telah meninjau dengan hati-hati, tepat waktu dan efektif, segala temuan-temuan yang diperoleh dari auditor internal dan eksternal (termasuk audit Bank Indonesia). Usaha ini antara lain dilakukan Direksi dengan meminta manajemen untuk melaporkan secara berkala kemajuan yang dicapai oleh Bank dalam memecahkan persoalan yang diangkat oleh para auditor. Selain itu, Direksi juga telah melakukan tindak lanjut dengan segera dan secara seksama untuk menangani dan merespon temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal dan auditor eksternal.

Audit Eksternal

Selain memenuhi kewajiban hukum Bank untuk mengeluarkan pendapat atas laporan keuangan, auditor eksternal telah memberikan Direksi pendapat pihak ketiga atas kecukupan sistem manajemen, pengawasan akunting dan informasi keuangan.

Pemilihan dan penunjukan auditor eksternal juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada di Bank. Dalam proses audit, Direksi juga telah memastikan transparansi penuh sedemikian rupa sehingga para pihak seperti auditor eksternal dapat mengeluarkan opini yang objektif atas laporan keuangan Bank.

3. Audit Internal

a. Fungsi Satuan Kerja Audit Intern ("SKAI")

SKAI merupakan suatu fungsi yang independen dari aktivitas yang diperiksa. Tujuan, ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab dari SKAI diatur dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit*

Unit ("SKAI"). The the Board of Directors has recognized the importance of the audit process and communicated the importance of this function.

The Board of Directors has carefully reviewed, in a timely and effective manner, the findings of both internal and external auditors (including BI audits). This effort was done by the Board of Directors such as to require Management to provide regular reports concerning the Bank's progress in resolving problems raised by auditors. In addition, the Board of Directors has also pursued prompt and thorough follow-up actions to address and respond to audit findings and recommendations from Internal Audit and external auditors.

External Audit

Apart from fulfilling the Bank's legal obligation to provide a statutory opinion on financial statements, external auditors have provided the Board of Directors with a third party opinion on the adequacy of management systems, accounting controls and financial information.

Selection and appointment of the external auditor have been exercised in accordance with the prevailing procedure in the Bank. During the audit, the Board of Directors has ensure full transparency in such a way that parties such as external auditors could form an objective opinion on the Bank's financial statements.

3. Internal Audit

a. Internal Audit Function

Internal Audit is a function that is independent of the activities it audits. The objective, scope of authority and responsibility of Internal Audit are defined in the Internal Audit Charter, which is

Charter) yang disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

SKAI DBS Indonesia bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur. Untuk menjaga independensi dan obyektifitas, Kepala SKAI juga memiliki akses secara langsung ke Komite Audit dan Dewan Komisaris.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab SKAI mencakup:

- Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektifitas dari manajemen risiko Bank dan sistem pengendalian intern (*internal control*), termasuk ketepatan waktu dan keakuratan pencatatan transaksi serta pengamanan aset Bank yang memadai;
- Memberikan penilaian yang independen terhadap proses manajemen perkreditan Bank, strategi portofolio dan kualitas portofolio;
- Mengkaji kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta kebijakan Bank; dan,
- Mengkaji apabila Manajemen telah mengambil langkah yang tepat dalam menindaklanjuti kelemahan-kelemahan pengendalian.

SKAI mengadopsi pendekatan audit berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dalam aktivitas pemeriksaan yang dilakukannya. Rencana audit tahunan dibuat dengan menggunakan kerangka penilaian risiko dan pengendalian yang terstruktur, yang mana SKAI menilai tingkat risiko melekat dan tingkat efektifitas pengendalian untuk setiap entitas yang diperiksa. Penilaian ini juga mencakup risiko-risiko yang muncul dari bisnis maupun produk baru yang terdapat pada Bank. Proyek-proyek audit direncanakan berdasarkan hasil penilaian tersebut, dengan memprioritaskan area-area yang

approved by the Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee.

Internal Audit of PT Bank DBS Indonesia reports directly to the President Director. To maintain independence and objectivity, the Head of Internal Audit also has direct access to the Audit Committee and the Board of Commissioners.

b. Duties and Responsibilities

The Internal Audit's responsibilities include:

- Evaluate the adequacy and effectiveness of the Bank's risk management and internal control systems, including whether there is prompt and accurate recording of transactions and proper safeguarding of assets;
- Provide an independent assessment of the Bank's credit management processes, portfolio strategies and portfolio quality;
- Review whether the Bank complies with laws and regulations and adheres to established policies, and,
- Review whether management is taking appropriate steps to address control deficiencies.

Internal Audit adopts a risk-based approach in its auditing activities. An annual audit plan is developed, using a structured risk and control assessment framework, where Internal Audit assesses the inherent risk and control effectiveness of each auditable entity in the Bank. The assessment also covers risks arising from new lines of business or products. Audit projects are planned based on the results of the assessment, with priority given to auditing higher-risk areas. Consideration is also given to conducting audit projects required by Otoritas Jasa Keuangan. Appropriate resources are

berisiko tinggi. Pertimbangan juga diberikan untuk melakukan proyek-proyek audit yang diharuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sumber daya yang tepat disusun untuk memenuhi rencana ini yang dikaji dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

SKAI memiliki akses yang tidak terbatas kepada manajemen senior dan Dewan Komisaris, termasuk wewenang untuk mencari informasi dan meminta penjelasan. Karyawan SKAI diwajibkan untuk mematuhi Kode Perilaku Karyawan dan juga Kode Etik yang ditetapkan oleh Institute of Internal Auditors, yang mana prinsip-prinsip objektivitas, kompetensi, kerahasiaan dan integritas didasarkan.

Laporan hasil audit yang terdiri dari temuan-temuan yang diidentifikasi serta rencana tindak lanjut dilaporkan kepada Komite Audit, Dewan Komisaris, dan manajemen senior. Perkembangan dari upaya tindak lanjut atas temuan audit dipantau melalui sistem manajemen temuan terpusat. Informasi mengenai status dari temuan audit yang belum selesai dilaporkan secara berkala ke Komite Audit, Dewan Komisaris, manajemen senior, dan kepala unit bisnis dan unit pendukung.

Otoritas Jasa Keuangan juga diinformasikan atas semua kegiatan audit yang relevan melalui laporan semester atas pelaksanaan fungsi audit intern dan dapat sewaktu-waktu meminta informasi lebih jauh terkait dengan kegiatan audit. SKAI juga bekerjasama dengan pihak pemeriksa eksternal untuk mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan.

SKAI menjalankan program pengendalian dan peningkatan mutu yang mencakup semua aspek aktivitas SKAI. Sesuai peraturan Bank Indonesia, review eksternal juga dilakukan setidaknya satu kali setiap tiga tahun oleh profesional dari organisasi ekstern. Penilaian terakhir dilakukan pada tahun 2011 oleh Ernst and Young (EY) dengan laporan akhir diterbitkan pada tanggal 20 September 2011. Opini EY menyatakan bahwa kegiatan SKAI secara umum sesuai dengan persyaratan BI. Penilaian berikutnya dijadwalkan di tahun 2014.

deployed to complete the plan, which is reviewed and approved by the Board of Commissioners, based on the recommendation from the Audit Committee.

Internal Audit has unfettered access to senior management and the Board of Commissioners, as well as the right to seek information and be provided explanations. Internal Audit staff are required to adhere to the Code of Conduct as well as the Code of Ethics established by The Institute of Internal Auditors, from which the principles of objectivity, competence, confidentiality and integrity are based.

Audit reports containing identified issues and corrective action plans are reported to the Audit Committee, the Board of Commissioners, and senior management. The progress of the corrective action plans is monitored through a centralised issue management system. Information on outstanding issues is included in regular reports to the Audit Committee, the Board of Commissioners, senior management and business and support unit heads.

Financial Service Authority is also informed of all relevant audit matters through a semester report on the implementation of internal audit function and may request further information on audit matters at any time. Internal Audit also works closely with the external auditors to coordinate audit efforts.

Internal Audit maintains a quality assurance and improvement program that covers all aspects of the internal audit activity. As regulated by Bank Indonesia, external quality assessment reviews are also carried out at least once in every three years by professionals from an external organisation. The last assessment was done in 2011 by Ernst and Young (EY) with the final report issued on 20 September 2011. EY opined that Internal Audit practices generally conform to BI's requirements. The next assessment is scheduled for 2014.

SKAI terus memperbaiki pendekatannya terhadap fungsi audit intern. Salah satu inisiatif adalah penggunaan *computer-assisted audit technique* (CAATs) yang ekstensif untuk efisiensi dan efektivitas yang lebih besar, serta untuk meningkatkan produktivitas. Teknologi akan terus memegang peran pokok dalam mendorong inovasi dan otomatisasi proses untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam melakukan pemeriksaan dan mengelola proses-proses departemen internal. Masa depan audit terletak pada kemampuan untuk mengidentifikasi risiko yang muncul. Dengan demikian, SKAI terus mencari cara untuk menghubungkan satu sama lain dengan berbagi wawasan dengan pihak yang berkepentingan tentang temuan-temuan, dan bagaimana salah satu masalah berhubungan dengan yang lain. Berbagi *boundary-spanning* ini juga melintasi segmen-segmen bisnis.

Terakhir, SKAI terus berinvestasi pada sumber daya manusia, memastikan bahwa SKAI memiliki cukup karyawan untuk memenuhi kebutuhan audit intern. Rencana acuan pelatihan yang tepat dan program peningkatan keterampilan diadakan untuk terus menerus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi auditor internal.

XV. Fungsi Manajemen Risiko

1. Fungsi Manajemen Risiko

Untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko, Bank membentuk Unit Manajemen Risiko. Unit Manajemen Risiko merupakan unit yang independen dari satuan-satuan kerja pengambil risiko.

Dalam melakukan manajemen risiko, pendekatan manajemen risiko dinyatakan dalam Rencana Bisnis Tahunan dimana pendekatan yang diambil paling tidak berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan dengan ukuran, latar belakang, perkembangan bisnis Bank, kebijakan manajemen dan kerangka kerja manajemen risiko dari perusahaan induk dan praktik-praktik internasional yang terbaik dan relevan.

Internal Audit continues to improve its approach towards the internal audit function. One of its initiatives is the extensive use of computer-assisted audit techniques (CAATs) for greater efficiency and effectiveness, as well as enhancing productivity. Technology will continue to play a central role in driving innovation and process automation to improve quality and efficiency in performing audits and managing internal department processes. The future of audit lies in the ability to identify emerging risks. As such, Internal Audit is continuously looking into ways to connect the dots by sharing insights on issues, and how one issue is connected to another, with all stakeholders. This boundary-spanning sharing also crosses business segments.

Last but not least, Internal Audit continues to invest in its people, ensuring that it is adequately staffed to meet the demands of internal audit. Proper training roadmaps and up-skilling programmes are instituted to constantly enhance the knowledge, skills and competencies of its internal auditors.

XV. Risk Management Function

1. Risk Management Function

In order to ensure implementation of its assigned risk management function, the Bank has established a Risk Management Unit. Risk Management Unit is independent from risk-taking units.

In terms of managing risk, the Bank has clearly stated its risk management approach in the Bank's Business Plan, in a way that the approach is at least in line with prevailing Bank Indonesia regulations, with a focus on and in line with the Bank's size, background, business growth, management policy as well as best and relevant shareholders' framework and international best practices.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Bank telah mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mempunyai akibat langsung terhadap laba Bank dan telah mengambil tindakan untuk menanganinya dalam risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar), risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan serta risiko strategis dan risiko reputasi. Faktor-faktor risiko tersebut dikelola dengan berbagai perangkat mitigasi yang ada di Bank, seperti misalnya kebijakan dan prosedur tertulis, tingkat wewenang dan batasan, pembagian fungsi dan tanggung jawab yang jelas, pengkajian ulang baik yang dilakukan oleh satuan itu sendiri maupun satuan independen perangkat mitigasi yang ada, pengkajian terhadap produk/aktivitas baru, proses pelaporan dan eskalasi, dan lain sebagainya.

Bank telah memantau dengan ketat semua risiko yang melekat pada aktivitas bisnis melalui pengawasan oleh Direksi dan pelaporan secara berkala kepada Dewan Komisaris. Sejumlah inisiatif telah diambil dalam tahun 2012 untuk mendukung rencana pertumbuhan bisnis Bank memasuki tahun 2013.

Untuk membantu Direksi di dalam mengelola berbagai risiko, Bank memiliki Komite Manajemen Risiko. Efektif sejak Juni 2010, agar Komite ini lebih fokus pada area-area yang dikelola dan dipantau, Bank membagi Komite ini menjadi tiga sub-komite, yaitu Komite Risiko Kredit, Komite Risiko Operasional dan Komite Risiko Pasar. Untuk penyesuaian dengan kondisi dan kerangka Bank, terhitung Juli 2011, ruang lingkup Komite Risiko Pasar telah diperluas dan menjadi Komite Risiko Pasar dan Likuiditas. Sedangkan untuk lebih melengkapi pengawasan risiko di tingkat satuan kerja bisnis, Komite Pengawas Bisnis telah dibentuk di masing-masing satuan

2. Duties and Responsibilities

The Bank has identified risk factors that have direct impact to Bank's profitability and have taken necessary actions to address those factors in credit risk, market risk (including interest rate risk and foreign exchange risk), liquidity risk, operational risk, legal risk, compliance risk as well as strategic and reputational risks. Those risk factors are managed by various mitigating tools in the Bank, such as written policy and procedures, delegation of authority and limits, segregation of functions and responsibilities, self and independent review on mitigating tools, new product/activities review, reporting and escalation process, and other mitigating tools.

The Bank has closely monitored all risks inherent to its business activities through performing active management oversight by the Board of Directors and regular reporting to the Board of Commissioners. A number of initiatives have been taken in 2012 to support the Bank's business growth in 2013.

In order to assist the Board of Directors to manage the various risks, the Bank has Risk Management Committee. Effective since June 2010, to allow the committees more focus on the management and monitoring of various areas, the Bank has divided the committee into 3 sub-committees, namely Credit Risk Committee, Operational Risk Committee and Market Risk Committee. For aligning with the Bank's condition and framework, effective since July 2011, the scope of Market Risk Committee has been extended and renamed as Market and Liquidity Risk Committee. While for improving the risk monitoring in business units, Business Control Committee has been

bisnis. Sedangkan Komite Asset dan Liability (ALCO) tetap dipertahankan untuk mengelola dan memantau neraca Bank. Di level Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris sebagai bagian dari pengawasan Dewan Komisaris terhadap risiko dan pengendalian intern di Bank.

Program sertifikasi manajemen risiko untuk para karyawan Bank juga telah diorganisasikan dan ditindaklanjuti untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai pemenuhan sertifikasi. Pelatihan "*risk awareness training*" dan "*reputational risk training*" juga telah dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran karyawan atas risiko. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan telah mengambil tindakan & risiko yang diperhitungkan dalam memberikan layanan kepada para nasabah, operasional dengan kepatuhan yang baik terhadap peraturan perundang-undangan dan standar tata kelola perusahaan.

XVI. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Dalam Jumlah Besar

Informasi mengenai dana kepada pihak terkait dan dalam jumlah besar bisa dilihat di Laporan Keuangan Bank per 31 Desember 2013 yang dibuat secara terpisah dan bisa diakses melalui situs Bank www.dbs.com/id

XVII. Rencana Strategis

Visi dari DBS Indonesia sejalan dengan visi dari DBS Group adalah "Menjadi Bank Asia Pilihan untuk Asia Baru."

DBS Group memiliki misi memperkuat keberadaan di negara-negara dengan strategi geografis, yaitu dengan meningkatkan skala jaringannya dan membangun kemampuan dan

established in each business unit. While Asset and Liability Committee (ALCO) still exists to manage and monitor the bank's balance sheet. In the Board of Commissioners level, Risk Monitoring Committee is established to assist the Board as part of the Board of Commissioners' oversight on risk and internal control in the Bank.

Risk management certification program for the Bank's employees also has been organized and properly tracked in order to meet Bank Indonesia requirement on completion of this certification. Risk awareness training and reputational risk training have also been conducted on a regular basis to promote the staff's risk awareness. This is to ensure that staff has measured & calculated risks when providing services to customers, operating with sound adherence to regulatory requirements and standards of good corporate governance.

XVI. Provision of Funds to Related Parties and In Large Exposures

Reference to information related to provision of funds to related parties and in large exposures can be made to the Bank Financial Statement as of 31 December 2013 made in a separate document and accessible at the Bank website at www.dbs.com/id

XVII. Strategic Plan

The Bank's vision in line with DBS Group's vision is to be the Asian Bank of Choice for the New Asia.

DBS Group has the mission to strengthen its in-county priorities through geographic strategy, to build scale across its network and build the talents' skills and capabilities to be able to

keterampilan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai ambisi tersebut. Di Indonesia, Bank mencerminkan tujuan tersebut dalam prioritas utama di bidang peningkatan jumlah nasabah, peningkatan angka penjualan silang dengan memperkuat faktor pendukung yang mencakup layanan, SDM, dan infrastruktur.

Adapun sasaran dan tujuan Bank adalah mengenali setiap kesempatan untuk tumbuh kembang, dengan tetap peka terhadap keterbatasan Bank. DBS Indonesia bertujuan untuk membangun dan mengembangkan waralaba DBS di Indonesia dengan mengukuhkan posisinya di beberapa segmen pasar. Untuk mengukuhkan posisinya di Indonesia, Bank mengandalkan pilar-pilar berikut ini:

Waralaba

Membangun waralaba yang kuat dan konsisten, mendapatkan nasabah yang loyal, pendapatan yang berkelanjutan, keuntungan yang semakin baik.

Profitabilitas

Perbaikan ekonomi global masih dalam tahap awal, oleh karena itu Bank menetapkan target bisnis pada tingkat yang moderat. Laba bersih setelah pajak diperkirakan pada tingkat yang sedang/menengah yaitu IDR 655 miliar, IDR 963 miliar dan IDR 1.504 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2014, dan 2015 berturut-turut.

Jaringan

Jumlah cabang dan jaringan yang cukup untuk menjangkau semua target segmen pada 2013 termasuk kepemilikan ATM, kantor cabang, serta *call centre*.

Brand

- Perusahaan paling diminati.
- Identitas brand yang baik di Indonesia

Rencana Bank yang lebih spesifik untuk tiap-tiap area bisnis digambarkan lebih detail dalam Rencana Bisnis Bank.

achieve the ambition. In Indonesia, the Bank reflects those aims through the Bank's priorities in growing a customer franchise, improving cross-selling and strengthening key enablers across service, people and infrastructure.

Recognizing opportunities for growth, yet being fully aware of the Bank's limitations, DBS Indonesia aims to establish and expand the DBS franchise in Indonesia by building niches in several market segments. In creating this niche in Indonesia, the Bank will rely on the following pillars:

Franchise

Build strong and consistent franchises, gain loyal customer, replenish recurring income, and improve margins over time.

Profitability

Global economic recovery is still in its infancy; therefore, Net Profit After Tax is to be held at a moderate level of IDR 655 billion, IDR 963 billion and IDR 1,504 billion for the years ended 31 December 2013, 2014, and 2015 respectively.

Network

A sufficient branch and channels to touch all the Bank's target segments by 2013, including proprietary units, branches, ATMs, and call centres.

Brand

- Employer of choice
- Coherent brand identity in Indonesia

Bank's specific corporate plan for each area of business is presented in greater detail in the Bank's annual business plan.

XVIII. Transparansi Kondisi Finansial dan Non-Finansial

Bank telah membuat laporan finansial dan non-finansial sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Bank juga telah mendistribusikan laporan tahunan Bank kepada institusi yang diharuskan oleh peraturan Bank Indonesia.

XIX. Hasil Pelaksanaan Self Assessment GCG

Hasil pelaksanaan penilaian sendiri GCG untuk periode laporan per 31 Desember 2013 menghasilkan nilai komposit 2.000 (Tata Kelola Memadai). Hal ini dikarenakan Bank telah mengimplementasikan kerangka kerja yang kuat termasuk pembentukan *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, untuk menilai kecukupan dan efektivitas struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan hasil yang baik yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.

XX. Etika Perusahaan

DBS Indonesia memiliki kode etik perusahaan yang diatur dalam pedoman tingkah laku perusahaan ("*Company Code of Conduct*").

1. Keberadaan Kode Etik Perusahaan

DBS Indonesia memiliki kode etik perusahaan ("Kode Etik") yang berisi prinsip dan standar tingkah laku yang diharapkan oleh Bank dari setiap orang yang bekerja di Bank. Prinsip-prinsip ini merupakan standar Bank dalam berhubungan dengan nasabah, mitra bisnis, atau pemangku kepentingan satu dengan yang lainnya.

Kode etik ini berlaku untuk karyawan penuh waktu, paruh waktu maupun karyawan kontrak, kontraktor, penugasan industrial dan karyawan agensi.

XVIII. Transparency of Financial and Non-Financial Conditions

The bank has prepared a financial and non-financial report in accordance with Bank Indonesia regulations.

The Bank has also distributed its annual report to various institutions, as required by Bank Indonesia regulations.

XIX. Self Assessment Result of GCG Implementation

The result of a self-assessment result of GCG implementation for the reporting period as of 31 December 2013 generated a composite score of 2,000 (Proper Implementation). This achievement was the result of the from the strong implementation of framework, including the establishment of having a governance structure, governance process and governance outcome in place, to validate the adequacy and effectiveness of structure and infrastructure of the Bank's corporate governance, hence implementation of GCG principles to produce a valuable outcome for the stakeholders of the Bank.

XX. Company Code of Ethics

DBS Indonesia has a company code of ethics as stipulated in its Company Code of Conduct.

1. Company Code of Conduct

DBS Indonesia has a Code of Conduct (the "Code") which sets out the principles and standards of behavior that the Bank requires for everyone who works for the Bank. These principles are the standards in dealing with customers, business associates, stakeholders and each other.

The Code applies to all full-time, part-time and temporary employees, to contractors, industrial attachments and agency employees.

2. Isi Kode Etik Perusahaan

Kode Etik Perusahaan berisi tentang:

- a. Prinsip Integritas Profesional;
- b. Prinsip Kerahasiaan;
- c. Prinsip Konflik Kepentingan
- d. Prinsip Keterlibatan yang Sewajarnya dengan Nasabah (*Fair Dealing*);
- e. Integritas dan Akurasi Pencatatan; dan
- f. Prinsip Pengungkapan (*Speak Up*).

3. Penyebaran dan Upaya Penegakan

Dalam mensosialisasikan Kode Etik Perusahaan, setiap karyawan yang baru bergabung di Bank akan diberikan *welcome package* yang salah satunya berisi Kode Etik Perusahaan. Karyawan berkewajiban untuk membaca dan memahami Kode Etik ini untuk kemudian dipatuhi. Sebagai konfirmasi bahwa karyawan telah membaca dan memahami isi Kode Etik ini, karyawan diminta untuk menandatangani lembar konfirmasi.

Selanjutnya, setahun sekali Departemen Sumber Daya Manusia akan mengingatkan seluruh karyawan melalui email mengenai isi Kode Etik dan meminta karyawan untuk menandatangani ulang lembar konfirmasi Kode Etik.

Selain itu, dalam *Induction Training* untuk karyawan baru, prinsip-prinsip dalam Kode Etik akan dijelaskan kembali.

Sebagai upaya penegakan, setiap orang berkewajiban untuk melaporkan pelanggaran atau kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik. Atasan karyawan, berdasarkan Prosedur Investigasi dan Eskalasi DBS Indonesia, bila perlu, harus memberitahukan Fungsi Kontrol dari organisasi seperti Legal, Kepatuhan & Sekretariat ("LCS"), Sumber Daya Manusia, atau Audit. Selain itu, karyawan juga harus melaporkan insiden berisiko tinggi, sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Eskalasi DBS Indonesia. Apabila karyawan mencurigai atasannya mungkin telah melanggar Kode

2. Content of Company Code of Conduct

Company Code of Ethic is comprised of:

- a. Principle of Professional Integrity;
- b. Principle of Confidentiality;
- c. Principle of Conflict of Interest;
- d. Principle of Fair Dealing with Customers;
- e. Principle of Integrity and Accuracy of Records; and
- f. Principle of Speaking Up.

3. Dissemination and Enforcement Measures

In relation to the dissemination of a Company Code of Conduct, a new joiner will receive welcome package, in which one of the contents is the Company Code of Conduct. The staff member shall read and understand the Code of Conduct, and how it applies to his or her duties in its implementation. To confirm that the staff member has read and understand the content, the staff member is required to sign a confirmation page.

On an annual basis, the Human Resources Department reminds all staff members, through an e-mail alert pertaining to the content of Company Code of Conduct, and staff is instructed to sign a confirmation letter of refresher of the Code of Conduct.

In addition, during Induction Training for new joiners, principles in the Code of Conduct are further explained.

As for its enforcement, everyone has the duty to report violations or potential violations of the Code. The supervisor, having given due consideration, should, if appropriate, notify a Control Function, such as Legal, Compliance & Secretariat ("LCS"), Human Resources or Audit. In addition, the staff member also has to report incidents as defined in the Incident Management Policy of DBS Indonesia. If the staff member suspects his/her supervisor may have violated the Code, the member shall bring this up to the next level of supervisor in

Etik, karyawan harus meneruskan hal ini ke atasan di tingkat berikutnya dalam rantai pelaporan dengan tembusan ke LCS.

XXI. Komitmen Perusahaan Terhadap Perlindungan Konsumen

1. Keberadaan Pusat Pengaduan Nasabah

DBS Indonesia berkomitmen untuk memastikan integritas bisnis termasuk kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/24/DPNP beserta perubahannya yakni Peraturan Bank Indonesia No.10/10/PBI/2008 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang mewajibkan Bank untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam menangani komplain dari nasabah maupun kuasanya. Untuk tujuan ini, dibentuklah *Unit Customer Experience and Quality*.

Secara umum, terdapat dua cara untuk menyampaikan komplain/masukan/pujian kepada DBS Indonesia. Komplain verbal adalah komplain yang diterima secara lisan dari nasabah yang mengunjungi cabang atau menghubungi *frontline staff (Customer Centre* atau karyawan yang ada di cabang-cabang). Komplain tertulis meliputi surat, faksimili, surat elektronik atau saluran informasi lainnya seperti media massa/koran.

2. Tindak Lanjut Pengaduan yang Diterima

Penanganan pengaduan berfokus kepada upaya untuk memastikan bahwa Bank merespon nasabah dengan prinsip titik hubung tunggal, yang juga berarti sebagai *ownership* atas pengaduan nasabah, dimana karyawan menangani pengaduan yang diterima dan menindaklanjuti proses penyelesaian hingga benar-benar tuntas di mata nasabah.

Proses pencatatan pengaduan dilakukan dengan memasukkan detail aduan ke dalam sistem, *Complaint Tracking System (CTS)*.

the chain of reporting, as well as copying it to LCS.

XXI. Company Commitment to Customer Protection

1. Customer Complaint Center

DBS Indonesia is committed to ensuring the integrity of its businesses, including compliance with Bank Indonesia Regulation No.7/7/PBI/2005 and Circular Letter of Bank Indonesia No.7/24/DPNP including its amendment of Bank Indonesia Regulation No.10/10/PBI/2008 regarding Resolutions of Customer Complaints which oblige Bank to establish policies and procedures to handle complaints from customers or their proxy. For this purpose, a Customer Experience and Quality Unit has been established.

In general, there are two ways of communicating complaints/feedback/compliments to DBS Indonesia. Verbal complaints are received from customers visiting branches or called through frontline staff (*Customer Centre* or staff at branches). Written complaints are to include a letter, facsimile, email or a communication through another information channel, such as mass media/newspaper.

2. Follow up Action on Complaints Received

The complaint handling procedure focuses on an effort to ensure that the Bank responds to the customer with a "one touch point" principle, which also means acknowledging responsibility for and following through with a customer complaint; specifically, the staff member who received the complaint shall pursue the resolution process until the matter is fully resolved in the customer's opinion.

The process of recording complaints begins with inputting complaint details into the Complaint Tracking System (CTS). If the case

Apabila permasalahan memerlukan investigasi dari unit-unit pendukung, pengaduan akan diteruskan kepada unit terkait. Unit pendukung akan melakukan investigasi dan memberikan informasi mengenai perkembangan/hasil di CTS. *Tim Customer Experience and Quality* juga memantau pengaduan dan memastikan bahwa semua pengaduan nasabah ditangani secara profesional dan direspon oleh karyawan yang menerima pengaduan sesuai dengan *service level agreement* yang telah ditetapkan secara internal, yaitu 3 hari kerja sejak diterimanya pengaduan. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja, karyawan wajib memberikan informasi kepada pihak yang memberikan pengaduan terkait dengan hasil investigasi.

3. Penyelesaian Pengaduan yang Diterima

Pada tahun 2013, statistik pengaduan yang diterima dari nasabah dapat dibagi dalam beberapa kategori dan disajikan sebagai berikut. Semua pengaduan telah diselesaikan dengan baik.

Unit/ Month	Jan/ Jan	Feb/ Feb	Mar/ Mar	Apr/ Apr	Mei/ May	Jun/ Jun	Jul/ Jul
CBG	7	5	7	4	8	7	7
IBG	2	10	4	3	3	1	2
Total	9	15	11	7	11	8	9

Unit/ Month	Agus/ Aug	Sept/ Sept	Okt/ Oct	Nov/ Nov	Des/ Dec	Total
CBG	2	4	1	5	5	62
IBG	1	4	2	1	2	35
Total	3	8	3	6	7	97

4. Program untuk Meningkatkan Layanan Kepada Nasabah

Untuk meningkatkan layanan nasabah, Bank telah melakukan inisiatif berikut ini di tahun 2013:

- (i) membentuk *wealth proposition* dan loyalitas melalui *loyalty program* dan meningkatkan kualitas layanan RM;
- (ii) Memperkuat layanan melalui *Process Improvement Event (PIE)* dan menyediakan *soft skills training* untuk para *frontliner*.

needs investigation from supporting units, the complaint will be forwarded to the related unit. A supporting unit will perform an investigation and update the progress/results on CTS. A Customer Experience & Quality team also monitors the complaint closely and ensures all customers' complaints are professionally handled and responded to by the staff member who receives the complaint, within the internal service level agreement of 3 working days from the date of receipt of the complaint. If the complaint cannot be settled within 3 business days, the staff member has to provide an update to the complainant on the status of the investigation.

3. Resolution of Complaint Received

Below is a register elaborating statistics on complaints received from customers, grouped into several categories. All complaints in this list have been resolved.

4. Programs to Improve Service for Customers

In order to improve service for customers, the Bank has implemented the following initiatives in 2013:

- (i) Build Wealth proposition and loyalty through loyalty program and improve RM service quality;
- (ii) Sharpen service delivery through Process Improvement Events and service soft skill training for all frontliners.

XXII. Whistle Blowing

Aturan internal mengenai *whistle blowing* disebutkan dalam Kode Etik Perusahaan pada prinsip ke-6, yaitu pengungkapan (*Speaking Up*).

Dalam prinsip ini, karyawan harus melakukan eskalasi kepada atasannya, LCS, Sumber Daya Manusia atau Audit apabila karyawan melihat adanya pelanggaran maupun potensi pelanggaran Kode Etik Perusahaan, ketidakwajaran, ketidaktepatan, kecurangan atau aktivitas yang tidak dibenarkan yang dilakukan oleh sesama karyawan, nasabah, penyedia jasa atau pihak ketiga yang terkait dengan DBS Indonesia termasuk DBS Group.

Secara umum, mayoritas isu dieskalasikan dengan cara-cara tersebut diatas. Namun demikian terdapat pula kondisi dimana, contoh, karyawan memiliki alasan tersendiri untuk khawatir akan balasan akibat membuat laporan ini. Setiap orang berhak melaporkan setiap kejadian atau potensi terjadinya ketidakwajaran, ketidaktepatan, pelanggaran hukum dan peraturan serta kode atau praktik etika yang berlaku kepada:

- (i) Kepala Departemen LCS
- (ii) Kepala Internal Audit/Kepala Sumber Daya Manusia/Presiden Direktur.

Setiap sangkaan yang dilaporkan oleh karyawan harus dilandasi itikad baik. Tindakan disiplin dapat diberikan kepada karyawan yang membuat sangkaan yang sembarangan, bersifat fitnah atau untuk kepentingan pribadi.

LCS, Audit dan Sumber Daya Manusia akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menjaga kerahasiaan laporan. Namun demikian, terdapat beberapa hal, seperti investigasi pemerintah yang terkait dengan laporan tersebut, yang membuat dikecualikannya aspek kerahasiaan.

XXII. Whistle Blowing

An Internal requirement pertaining to whistle blowing is stated in the Company Code of Conduct, in the 6th principle, i.e. "Speaking Up".

This principle states that a staff member shall escalate to his/her supervisor and LCS, Human Resources or Audit if he/she observes any actual or potential breach of the Company Code of Conduct, irregularity, impropriety, fraud, breach of laws, regulations or other inappropriate activity by a fellow employee, customer, vendor or third party relating to DBS Indonesia, including DBS Group.

In general, most issues can be escalated in the manner set out above. However, there may be extenuating circumstances calling for an alternative; for instance, where an employee would have genuine reason to fear retribution from submitting a report. Anyone may report any suspected irregularity, impropriety, breach of laws, regulations, applicable code or ethical practice to:

- (i) Head of Group LCS
- (ii) Head of Internal Audit/Head of Human Resources/President Director

Any allegations reported by a staff member must be made in good faith. Disciplinary action may be taken against employees who make allegations frivolously, maliciously or for personal gain.

LCS, Audit and Human Resources will make every effort to maintain confidentiality over any such report. However, there may be instances, such as government investigations that arise from a report, that result in the loss of confidentiality.

XXIII. Akses Informasi & Data Perusahaan

Situs

Guna mendukung kemudahan dalam mengakses informasi bagi para pemangku kepentingan, DBS Indonesia senantiasa membangun landasan teknologi informasi yang kuat dan andal dalam memberikan dukungan penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui situs www.dbs.com/id. Selain itu, informasi-informasi lebih lengkap mengenai Bank dapat diperoleh di situs Bank termasuk laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank.

Situs Layanan Pelanggan

Sedangkan bagi para pelanggan Bank serta pemangku kepentingan pada umumnya dapat mengirimkan informasi atau keluhan yang dirasakan melalui fasilitas "Hubungi Kami" di situs www.dbs.com/id. Informasi lebih lanjut dapat pula didapatkan dengan menghubungi Bank secara langsung melalui telepon ke 021-29885000 (Hunting).

Media Massa

Perusahaan secara aktif melakukan publikasi dari setiap aksi korporasi yang dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Intranet

Fasilitas intranet sebagai sarana penyebaran informasi kepada seluruh karyawan DBS Indonesia menjadi salah satu fasilitas pendukung yang efektif dalam mendukung kegiatan operasional dan pertukaran informasi di lingkungan Bank DBS Indonesia.

XXII. Access to Corporate Information

Website

To provide all stakeholders with better access to information, DBS Indonesia regularly develops robust and reliable information technology platforms in support of the supply of information, in an integrated, timely and targeted manner, through www.dbs.com/id. More detailed information about the Bank can be obtained from this website, including Annual Reports, Financial Reports and reports on Corporate Social Responsibility (CSR) activities.

Online Customer Service

The Bank's customers and other stakeholders can send information or complaints through the "Contact Us" facility on the www.dbs.com/id. Further information can be obtained by directly calling the Company at 021-29885000 (Hunting).

Mass Media

The Company is active in publicizing every corporate action through mass media, both print and electronic.

Intranet

An Intranet facility is equally accessible by all employees of DBS Indonesia as an effective tool, for distributing information internally with regard to operational developments, along with other useful information relating to company activities.

Jakarta, Mei 2014

Untuk dan atas nama Dewan Komisaris,
For and on behalf of Board of Commissioners,



Lim Chu Chong
Komisaris/Commissioner

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Nama Bank : PT Bank DBS Indonesia
Posisi : 31 Desember 2013

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-

Analisis

A. Governance Structure

Komposisi dan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, termasuk komite-komite khusus yang didirikan sejak tahun 2007. Pedoman kerja, sistem dan prosedur yang terkini pada seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap dan komprehensif. Pada sisi lain, perlu dilakukan pengoptimalisasian komposisi Direksi.

B. Governance Process

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG dan, Dewan Komisaris dan Direksi telah bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Direksi juga telah secara efektif melakukan manajemen bisnis dan melaksanakan rencana strategis Bank. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. Aspek transparansi Dewan Komisaris dan Direksi baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas komite-komite telah berjalan efektif sejalan dengan usaha Bank dan pelaksanaan rapat komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman internal dan terselenggara secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank telah berjalan efektif dan memenuhi pedoman internal serta sesuai standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB. Satuan Kerja Audit Internal telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan telah dilakukan secara efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum seperti yang disebutkan dalam ketentuan, termasuk kualitas dan jangkauan pekerjaan audit.

Manajemen mampu mengatasi kelemahan-kelemahan penerapan manajemen risiko yang tidak material. Rencana Bisnis Bank disusun dengan memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan yang sehat.

Bank telah memberikan fasilitas kredit kepada nasabah berdasarkan area, industri dan segmen pasar. Namun demikian, kredit yang diberikan masih terfokus pada debitur inti.

C. Governance Outcome

Bank mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan internal yang sangat komprehensif dengan pelaksanaan yang sangat baik. Bank tidak memiliki kasus konflik kepentingan, mengingat *corporate culture* telah ditanamkan dengan baik. Bank telah menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan kepada seluruh stakeholders tidak terbatas pada yang diwajibkan dan sangat mudah untuk diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bank telah membuat Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* setiap tahun berdasarkan peraturan yang berlaku. Laporan telah merefleksikan kondisi aktual pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank.

Saat ini Bank menggunakan Finacle sebagai corebanking system. Corebanking system ini akan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dari Bank. Pada tahun 2012, Bank telah melakukan peningkatan versi Finacle ke versi 10.2, yang diharapkan dapat lebih menunjang kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Bank, khususnya terkait ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan handal.

Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan dengan sangat independen dan tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK.

Dari pelaksanaan pengawasan internal, masih menunjukkan terdapat kelemahan yang walaupun tidak menimbulkan kerugian pada Bank tetapi perlu dilakukan perbaikan. Tindakan perbaikan tersebut dilakukan oleh unit terkait dan dipantau oleh Internal Audit dan Unit Manajemen Resiko.

SELF ASSESSMENT REPORT ON IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Bank : PT Bank DBS Indonesia
As of : 31 Desember 2013

Self Assessment Result on GCG Implementation		
	Rank	Rank Definition
<i>Individual</i>	2	The rank reflects that the Bank's management has performed Good Corporate Governance properly. This is reflected from adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. Weaknesses in implementation of Good Corporate Governance are minor and insignificant and can be resolved through normal measure from the Bank's management.
<i>Consolidated</i>	-	-
Analysis		

A. Governance Structure

The composition and competence of the Board of Commissioners and Board of Directors fit with the size and complexity of the Bank's business, including the Committees since its establishment in 2007. The latest and updated guidelines, system and standard operating procedure in all level of organisation is made available and comprehensive. On the other hand, optimisation of Board of Directors composition is required.

B. Governance Process

The performance of duties and responsibilities of Board of Commissioner and BoD have fulfilled the principles of GCG and the Board have acted independently in decision-making process. BoDs also have effectively manage business and have carried out the Bank's strategic plan. Board Meetings have been carried out in effective and efficient manner. Transparency aspect of the Board were adequate pursuant to the prevailing laws and regulations.

The Committees have performed its duties effectively in line with the Bank's business and the meetings have been carried out in effective and efficient manner in accordance to internal guideline.

The function of internal audit has been carried out effectively and has fulfilled internal guidelines and minimum standard as set down by SPFAIB. Internal Audit Working Unit has performed its function independently and objectively. The performance of audit by public accounting firm has fulfilled the required criteria and has achieved the minimum standard as required by the regulations, including the quality and scope of audit work.

Management of the Bank was capable to manage immaterial weaknesses in risk management implementation. The Bank Business Plan has been prepared by taking into account relevant external and internal factor and by considering principle of prudence and sound banking principle.

The Bank has provided credit facility to customers covering various regions, industries and market segments. Nonetheless, the facility remains concentrated in core debtor.

C. Governance Outcome

The Bank was capable to avoid potential conflict of interest through proper comprehensive internal policy implementation. The Bank does not have any case involving conflict of interest, considering that corporate culture has been vested properly. The Bank has also provided financial and non-financial information to the stakeholders of the Bank including but not limited to those required by regulations, and are made easily accessible by stakeholders.

The Bank has prepared Good Corporate Governance Implementation Report annually based on prevailing laws and regulations. The reports have reflected the actual condition of implementation of Good Corporate Governance at the Bank.

The Bank currently uses the Finacle as core banking system. Core banking system will continue to be improved according to the needs of the Bank. In 2012, the Bank has the enhanced version of Finacle to version 10.2, which is expected to further support the needs of the Bank's management information system, in particular regarding the availability and adequacy of internal reporting that is complete, accurate, and reliable.

Decision making in provision of fund is made independently and no breach and excess of legal lending limit.


Implementation of internal oversight, still shows minor weaknesses though poses no harm to Banks but improvement is required. The corrective actions are undertaken by related units and monitored by Internal Audit and Risk Management Unit.

Asia's Safest, Asia's Best

Safest Bank, Asia
2009-2013
Global Finance

Best managed bank,
Asia-pacific 2013
The Asian Banker

PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower, Lobby, 33rd-37th Floor
Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940
Indonesia
Phone: (62-21) 2988 5000
Fax: (62-21) 2988 5005

 www.facebook.com/dbs.id

www.dbs.com/id

 **DBS. Living, Breathing Asia**

 **DBS**